



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIRJEN IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI, DIRJEN MINERBA
KEMENTERIAN ESDMRI DAN KETUA UMUM ASOSIASI SEMEN
INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: RDP dan RDPD
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 25 Januari 2022
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	: 1. Pasokan Batu bara untuk Industri Semen; 2. Tata Niaga Semen, dan 3. Lain-lain
Hadir	: 28 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-PG/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 4 orang anggota dari 11 anggota
1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
 2. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
 3. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
 4. Novri Ompusunggu

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Drs. Mukhtarudin
3. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
4. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. H. Subarna, S.E., M.Si.
3. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons), M.Eng. Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si
2. H. Ali Ahmad
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Sartono Hutomo S.E., M.M.
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Muhammad Khayam (Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian RI)
2. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Minerba Kementerian ESDMRI)

3. Ir. Widodo Santoso, M.B.A. (Ketua Asosiasi Semen Indonesia)

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) dan juga dengan Kementerian Perindustri, maaf, Kementerian Perindustrian dan juga Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dan kali ini juga kita lakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Semen Indonesia.

Bapak/Ibu sekalian,

Sekedar prolog bahwa rapat ini adalah sama-sama kita ketahui guncangan cukup signifikan harga batu bara. Di mana kita ketahui batu bara tidak hanya dipakai oleh PLN, tetapi juga industri. Nah, sehingga hari ini kita rapat kita ingin duduk, kita ingin membahas berbagai hal bagaimana terbaik buat semuanya. Baiklah.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam sejahtera kami sampaikan.

Namo Buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPRRI hadir juga *virtual* nanti sebentar lagi Pak Maman Abdurahman juga akan hadir,

Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPRRI baik yang hadir fisik langsung maksudnya, semua sih hadir fisik ya, ada juga yang *virtual*,

Yang kami hormati Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil atau IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,

Yang kami hormati Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia,

Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Semen, serta hadirin, maaf, Asosiasi Semen Indonesia, serta

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama sudah sangat tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat* sehingga kita tugas dan fungsi kita melalui rapat dengar pendapat kali ini secara protokol kesehatan baik yang hadir fisik langsung maupun hadir melalui *virtual* dan mudah-mudahan kita semuanya berdoa *Omicron* yang sekarang melanda juga kita, mudah-mudahan dapat kita cegah dan kita tekan penularannya, sehingga kita akan segera keluar dari kemelut wabah ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPRRI mengikuti rapat dengar pendapat umum pada hari ini. Dan sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan rapat, jadwal rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2021-2022. Maka, pada hari ini, kita akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia, serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia dengan agenda sebagai berikut:

1. Menyangkut pasokan batu bara untuk industri semen;
2. Tata niaga semen;
3. Lain-lain.

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan data sekretariat, anggota Komisi VII yang hadir berjumlah 23 anggota dari 51 anggota Komisi VII yang terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat hari ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian,

Dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.30 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI bahwa rapat ini akan selesai kurang lebih 2 jam sejak dimulainya rapat ini. Jadi, akan selesai kurang lebih pukul 15 lewat 45 menit, apakah setuju, Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Baiklah.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Bagi industri semen batu bara merupakan bahan baku dan bahan bakar utama yang memiliki persentase kurang lebih 40% dalam struktur biaya produksi. Sementara itu, sejak bulan Desember 2020 harga batu bara internasional terus meningkat dan mempengaruhi harga batu bara acuan atau HBA di dalam negeri yang ditetapkan Kementerian ESDM Republik Indonesia.

Hal tersebut berdampak pada industri semen di tanah air yang telah menyampaikan beberapa keluhan antara lain: industri, industri semen tidak mendapat persediaan batu bara akibat banyak pelanggaran pemasok terhadap kewajiban DMO maupun jumlah persediaan minimum batu bara untuk produksi tidak berada pada batas yang aman. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia wajib bertanggung jawab guna menjamin kelangsungan ketersediaan batu bara untuk industri semen.

Di sisi lain, industri semen merupakan industri yang bertanggung jawab sekitar 8% emisi karbondioksida global atau CO₂. Sehingga, diperlukan tata kelola lingkungan yang baik guna mewujudkan industri semen yang berkelanjutan. Dengan adanya ratifikasi *Paris Agreement* menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 maka diperlukan juga kontribusi dari industri semen dalam rangka penurunan emisi karbon sesuai komitmen *national determined contribution* atau NDC sebesar 29% dengan upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional.

Permasalahan lain bahwa, industri semen dalam negeri, maaf, industri semen dalam negeri adalah isu kelebihan *supply* atau *oversupply* yang membuat pabrikan semen nasional dilanda tingkat utilisasi yang rendah yang diperburuk dengan tingkat konsumsi yang rendah karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 bahkan *oversupply* industri semen nasional sebesar 51 juta ton dengan utilisasi rata-rata 56% saja. Oleh karena itu, Bapak/Ibu sekalian, pemerintah harus mengkaji solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di industri semen seperti *oversupply*, pajak karbon, kesulitan pasokan batu bara, dan lain-lain agar industri semen dalam negeri tetap eksis dan berkontribusi dalam, terhadap pembangunan infrastruktur di tanah air.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kesempatan hari ini Komisi VII DPRRI ingin mendengar penjelasan yang mendetail dari Dirjen IKFT Kementerian ESDM Republik Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia, serta Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia terkait permasalahan yang dihadapi oleh industri semen hari ini beserta solusinya, termasuk menyangkut tata niaga impor dan ekspor pada semen yang selama ini diterapkan.

Baiklah.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Selanjutnya, untuk efektifnya waktu, maka kami persilahkan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dilanjutkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya.

Kami persilakan Bapak-bapak sekalian.

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Baik.

Yang terhormat Bapak Sugeng Suparwoto Ketua Komisi VII DPRRI,
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR, baik yang melalui *offline*
maupun yang *online*,
Bapak Ridwan Djamaluddin Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara
Kementerian ESDM,
Bapak Widodo Santoso Ketua Asosiasi Semen Indonesia,
Bapak/Ibu yang kami hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Selamat siang,

Para anggota Dewan yang saya hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama pada acara rapat dengar pendapat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan RDP ini, sehingga dapat menyampaikan kondisi faktual industri semen terkait batu bara saat ini.

Izinkan saya untuk presentasi. Masuk ke *slide* 3, profil industri semen nasional.

Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Saat ini industri semen masih mengalami *oversupply* ya atau *overcapacity* sebesar 47%. Pada tahun 2019, utilisasi atau pemanfaatan kapasitas industri semen mencapai 65%. Namun, dengan adanya pandemi 2020 menurun menjadi 56%. Di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 58% ya dan namun itu semuanya masih di bawah utilisasi tahun 2019.

Masuk ke *slide* nomor 4, jadi kinerja industri semen nasional. Jadi, data yang ditunjukkan pada menunjukkan bahwa *overcapacity* atau *oversupply* yang terjadi pada industri semen itu mulai melebar pada tahun 2014. Hal ini disebabkan kapasitas produksi yang bertambah jauh melebihi pertumbuhan permintaan dalam negeri. Pada tahun 2021 *overcapacity* itu masih sebesar 47 juta ton dengan utilisasi rata-rata 58%. Guna memperbaiki iklim usaha industri semen yang saat ini dalam kondisi *overcapacity* dengan tujuan agar menjadi

sehat dan berdaya saing, maka diperlukan pengaturan investasi baru untuk wilayah dan jangka waktu tertentu. Investasi baru untuk *integrated plan* dan *grading plan* hanya untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, hingga tercapainya utilisasi pabrik semen nasional sebesar 85%.

Produksi dan kebutuhan semen dalam negeri tahun 2021 naik sebesar 6,8 dan 4,3%. Jadi, produksinya naik 6,8%, kebutuhannya naik 4,3% dibanding tahun 2020. Jadi, hal ini menunjukkan adanya pemulihan kondisi industri semen dari awal pandemic. Namun, kondisi tersebut belum mencapai kondisi normal seperti tahun 2019. Pertumbuhan industri semen masih dibayangi oleh gelombang pandemi berikutnya yang mungkin terjadi.

Slide nomor 5, mengenai tata niaga industri semen. Saat ini tidak ada ketentuan khusus pengaturan tata niaga di dalam negeri dan ekspor untuk semen, tidak ada pengaturan wilayah penjualan serta pengaturan harga, semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Ada kewajiban pemenuhan standar nasional Indonesia atau SNI untuk semen yang beredar di dalam negeri karena telah berlaku secara wajib. Impor semen mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor, sedangkan ekspor mengikuti ketentuan pada negara tujuannya.

Masuk *slide* nomor 6, ekspor semen dan klinker. Jadi, guna mengatasi kondisi *oversupply* yang mengakibatkan rendahnya utilisasi, maka produsen semen nasional berusaha untuk meningkatkan ekspor seperti ditunjukkan pada grafik. Jadi, pada tahun 2019 ekspor klinker mengalami kenaikan sebesar 239% dan terus mengalami peningkatan, serta negara tujuan negara ekspor pun semakin meluas hingga ke Amerika.

Guna mengimbangi penurunan permintaan dalam negeri akibat pandemi tahun 2020 dan 2021, industri semen semakin gencar melakukan ekspor. Tercatat pada tahun 2020 ekspor semen dan klinker naik sebesar 44% dan tahun 2021 mengalami kenaikan kembali 25%. Proyeksi pertumbuhan ekspor semen dan klinker tahun 2022 sangat bergantung pada harga dan ketersediaan batu bara sebagai bahan bakar utama.

Slide 7, ekspor semen dan klinker. Pada semester 2 tahun 2021 yang menunjukkan bahwa terjadi hambatan pada ekspor. Hal ini disebabkan oleh 2 kendala. Jadi, pada awal September semester 2 terdapat pembatasan masuknya kapal dari Indonesia ke Cina, akibat tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Selanjutnya, saat kasus Covid-19 di Indonesia mulai menurun terdapat kendala ketersediaan batu bara bagi industri semen akibat dari kenaikan harga batu bara internasional. Hal ini mengakibatkan, menyebabkan produksi semen dan klinker terhambat, sehingga industri semen tidak dapat memenuhi permintaan ekspor.

Slide berikutnya *slide* 8 masalah pasokan batu bara untuk industri semen. Sejak Desember 2020, harga batu bara internasional terus meningkat dan mempengaruhi harga batu bara acuan di dalam negeri yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Kenaikan harga batu bara internasional berdampak pada

terjadinya kenaikan harga batu bara dalam negeri yang tinggi dan sangat memberatkan industri dengan *freed on board* rata-rata lebih dari 55%.

Guna mengatasi permasalahan yang timbul, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM ya terus melakukan koordinasi sampai terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 206 ya Tahun 2021 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Pemenuhan Bahan Baku atau Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk Dalam Negeri yang diberlakukan mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan harga batas atas batu bara sebesar USD 90.

Saat ini, pelaksanaan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 206 tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri semen ya. Beberapa poin yang disampaikan oleh Asosiasi Semen Indonesia terkait pelaksanaan keputusan menteri tersebut:

1. Stok batu bara di perusahaan semen mulai bertambah 50 sampai 60% karena adanya instruksi pemerintah terkait larangan ekspor batu bara selama bulan Januari 2022, yang berikutnya;
2. Beberapa pabrik semen telah mendapatkan harga batu bara USD 90 sesuai skema kepmen yaitu Pabrik Semen Padang, Semen Tonasa, Solusi Bangun Indonesia, Semen Gresik, Semen Bosowa, sedangkan yang belum mendapatkan harga sesuai skema yaitu Pabrik Indocement Tunggal Prakarsa, Cemindo Cemerlang, Sinar Tambang Arthalestari, Semen Imasco Asiatic, Semen Jawa dan Jui Shin;
3. Masih adanya perusahaan pertambangan batu bara yang belum melaksanakan kepmen tersebut, mungkin disebabkan karena tidak adanya sanksi berat yang dikenakan;
4. Kontrak pembelian batu bara jangka panjang sulit diterapkan mengingat kepmen hanya berlaku sampai 31 Maret 2022.

Dengan adanya kelangkaan batu bara telah berefek negatif, yaitu berkurang atau terhentinya ekspor semen dan klinker.

Para Anggota Dewan yang saya hormati,

Kesimpulan dari paparan ini adalah sehubungan dengan permasalahan batu bara, diperlukan tindakan cepat agar industri semen mendapatkan pemenuhan batu bara sesuai dengan kebutuhannya. Karena industri semen digunakan untuk menunjang proyek-proyek infrastruktur.

Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap putusan Menteri ESDM Nomor 206 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku atau Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk Dalam Negeri. Kedua, memperpanjang waktu pemberlakuan pembelian harga batas 90 dolar untuk semen. Diharap pemberian keputusan menteri ini dapat terbit awal bulan Maret 2022 sebelum pabrikan melakukan perpanjangan kontrak pembelian batu bara. Ketiga, menaikkan persentasi DMO batu bara menjadi 30 atau 35%.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baiklah.

Dilanjutkan langsung, Dirjen Minerba.

Dipersilakan, Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat siang.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan, beserta
Anggota Komisi VII DPRRI yang hadir pada kesempatan ini.

Kami menyiapkan bahan paparan Pak Pimpinan dan para anggota dalam dua topik besar. Yang pertama adalah pasokan batu bara dalam industri semen. Yang kedua terkait tata niaga semen. Kami lebih fokus kepada penyiapan bahan baku yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami.

Pertama ingin saya sampaikan mengenai DMO batu bara secara nasional. Ini adalah realisasi DMO batu bara secara nasional sampai dengan Desember 2021. Di mana DMO kita berjumlah 133 juta ton atau 97% dari target, semula produksi direncanakan 625 juta ton. Namun, realisasi produksi adalah 614 juta ton dan DMO yang semula direncanakan 137,5, realisasinya adalah 133. Dari total produksi batu bara yang 614 juta ton itu diekspor sejumlah 435 juta ton atau 89% dari target dengan nilai ekspor 31,6 miliar dolar.

Dari demo tersebut, konsumsi batu bara dalam negeri secara nasional, *slide* berikutnya, ini dapat kita lihat. *Slide* berikutnya. Ini dapat kita lihat pada tabel, dapat ditayangkan *slide* berikutnya. Ini adalah di nomor 6 itu,

Pak Ketua serta anggota yang terhormat,

Kita lihat untuk industri semen secara total tahun 2021 konsumsi batu baranya adalah 4,45 juta ton. Kita lihat kalau di bagian atas itu yang paling dominan adalah untuk listrik PLN. Namun, di *bar chart* yang di atas itu semen

adalah yang berwarna hijau itu. Jadi, penggunaannya secara nasional tidak jauh di bawah penggunaan untuk listrik.

Nah, kemudian berdasarkan informasi dan laporan, serta koordinasi yang kami terima menjelang akhir 2021 atau tepatnya pada bulan Oktober, kami mendapat informasi dari Asosiasi Semen Indonesia bahwa beberapa pabrik semen mulai kesulitan pasokan batu bara, antara lain karena harga mahal atau penyebab utamanya ya memang karena harga mahal. Setelah dua kali mendapat masukan, kami melakukan rapat terpadu dengan mengundang juga Kementerian Perindustrian. Kami mendapat, akhirnya berkesimpulan bahwa memang perlu kebijakan untuk mengendalikan harga batu bara agar pasokan batu bara untuk semen dan kemudian ditambah untuk pupuk dapat terpenuhi.

Pupuk dan semen memang menjadi prioritas, karena ke dua komoditas ini adalah masuk dalam komunitas penting dalam kebijakan pemerintah, sehingga dapat dikatakan tidak boleh tidak tersedia. Apalagi semen, kita pahami bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur sehingga semen, ketersediaan semen tidak boleh menjadi kendala.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, keluarlah Keputusan Menteri ESDM Nomor 206 Tahun 2021 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Pemenuhan Bahan Baku atau Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri. Ditetapkan beberapa poin penting, yang pertama harga sebesar 90 dolar Amerika per *metric ton free on board* didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322, total *moisture* 8%, total *server* 0,8% dan *ash* atau abu 15%. Spesifikasi ini tentu saja kami diskusikan dengan Dirjen Industri dan Kementerian Perindustrian.

Butir kedua dan ketiga adalah masa berlakunya 1 November 2021 sampai dengan 31 Maret 2022. Pada saat kami melakukan rapat dan diskusi, diperkirakan untuk kebutuhan pemenuhan kepmen ini diperlukan 5,1 juta ton batu bara. Nah, pemenuhan ini saya kira yang penting dicatat juga adalah tidak menambah kewajiban DMO perusahaan-perusahaan. Jadi, artinya tidak ada beban tambahan bagi perusahaan untuk memasok batu baranya. Bahkan kalau kita lihat harganya lebih tinggi daripada harga acuan yang ditetapkan untuk PLN. Dengan harapan kepmen ini bisa dapat diimplementasikan, sehingga kebutuhan batu bara di dalam negeri dapat kita penuhi.

Nah, setelah diterapkan, memang tadi disampaikan Pak Dirjen IKFT bahwa belum sepenuhnya terimplementasikan. Beberapa penyebab, tadi sebutkan kontrak jangka Panjang. Namun, yang agak spesifik adalah ketika sudah ada kontrak antara perusahaan batu bara dengan perusahaan semen dengan harga tertentu yang dibuat sebelum 1 November 2021. Apakah mengikuti kontrak atau mengikuti kepmen. Arahan terakhir yang kami terima dari Bapak Menteri ESDM adalah mengikuti kepmen, mengikuti kepmen. Ini ditegaskan juga terkait ketika beberapa perusahaan pupuk sudah mulai mengalami kekurangan pasokan.

Nah, berikutnya perlu juga saya gambarkan, *slide* berikutnya. Ini adalah rencana kebutuhan batu bara dalam negeri 2022 - 2025. Kalau kita lihat sekali lagi semen yang pada kebutuhan tahun ini 4,45 juta ton akan meningkat, Bapak/Ibu sekalian. Tahun 2022 akan meningkat menjadi 15 juta ton, kemudian 23 juga demikian dan akan terus meningkat menjadi 1607 dan pada tahun 2024 dan 2025. Ini adalah antisipasi kami untuk penyediaan batu bara di dalam negeri, khususnya untuk industri semen.

Kemudian, tadi Bapak Dirjen IKFT menjelaskan akan mengharapkan penguatan pengawasan dan evaluasi, serta memperpanjang masa berlaku.

Bapak Pimpinan, serta
Anggota Komisi VII yang terhormat,

Kami memang selalu mengevaluasi dari waktu ke waktu jika ada kebutuhan di dalam negeri, maka kita sekali lagi akan tetap memprioritaskan penggunaan batu bara ini untuk industri di dalam negeri terlebih dahulu. Itu mengenai batu bara untuk industri semen, Bapak Ketua serta anggota yang terhormat.

Kemudian saya sampaikan beberapa hal terkait komoditas bahan baku untuk industri semen. Secara umum, industri semen ini membutuhkan batu gamping, lempung dan pasir kuarsa, serta beberapa mineral lain sebagai pelengkap. Yang pertama nanti akan saya sampaikan beberapa data mengenai komoditas tersebut. Namun, juga dapat saya sampaikan bahwa industri semen ini juga berdampak langsung yang penting untuk PAD atau pendapatan asli daerah. Di mana pemanfaatan batu gamping, lempung dan pasir yang hakekatnya adalah bahan, bahan baku, bahan galian batu itu merupakan objek pajak kabupaten/kota. Jadi, sekali lagi, bahan baku industri semen ini adalah objek pajak kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu yang dapat saya gambarkan tentang pendapatan.

Kemudian juga pada gambar, *slide* berikutnya. Ini kasus untuk semen di Jawa Timur. Di mana sebagaimana kami pahami sebelumnya bahwa ada kunjungan kerja ke wilayah Jawa Timur yang memberikan perhatian tentang perlunya pasokan bahan baku pabrik semen di Jawa Timur ini agar dapat menggunakan bahan baku yang juga berasal dari daerah sekitarnya. Nah, ini saya kira juga dapat kita penuhi, dapat kita, dapat kita sarankan agar pabrik semen ini membeli bahan baku dari sekitar wilayah pabriknya. Dapat kita lihat pada *slide* berikutnya. Ini adalah potensi bahan baku yang ada di Jawa Timur. Batu gamping cukup banyak. Ada 53 izin usaha pertambangan. Ada datanya semua, sumber daya hipotetik tereka, terunjuk dan terukur sehingga semua dapat, dapat kita perhitungkan dari sisi *supply* dan *demand*-nya. Demikian juga dengan lempung atau *clay* ada 30 IUP, serta biji besi.

Pada dasarnya, Bapak/Ibu sekalian, kalau kita mengambil kasus Jawa Timur ini untuk pemenuhan pasokan bahan baku industri di Jawa Timur, kita memenuhi cukup bahan baku untuk digunakan.

Kemudian, pada *slide* 18, ini juga ingin saya laporkan tentang pasir besi. Saat ini ada *smelter* pasir besi yang sudah beroperasi di Sukabumi, kemudian ada juga rencana *smelter* pasir besi yang akan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin. Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Mohon maaf, Pak Dirjen. Ini disampaikan *slide* 13, tapi di kami *slide* 12 sudah terima kasih, Pak Dirjen.

DIREKTUR JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Mohon maaf, Ibu. Ini lampiran di yang kami siapkan, Ibu. Mohon maaf, ini lampiran yang sengaja saya paparkan untuk memaparkan kesiapan pasokan kita untuk biji-biji. Jika diperlukan dapat kami susulkan nanti, Ibu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Jadi, sekali lagi ini adalah *smelter* yang sudah beroperasi, *smelter* biji besi. Sedang juga rencana *smelter* yang akan dibangun dengan kapasitas *input* 1,5 juta dengan produknya *pig iron* 600 ribu ton.

Demikian Bapak Pimpinan, serta anggota yang terhormat yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/ F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya, terima kasih, Pak Ridwan.

Sebelumnya saya *update* dulu, saya menggantikan Pak Sugeng karena beliau ada rapat 1 jam dan nggak bisa ditinggalkan. Jadi, saya mohon izin saya ambil alih.

Tadi Pak Dirjen udah, selanjutnya tadi baru yang pertama ya, Pak ya. Oh yang kedua, yang pertama tadi dari semen dari IKFT, baru Pak Dirjen Minerba, sekarang dari Asosiasi Semen Indonesia. Ya kita kasih kesempatan dulu ya biar tuntas ya.

Ya, silakan dari Pak Semen.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera semuanya.

Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Pimpinan Rapat, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII baik yang *offline* maupun *online*.

Kami mewakili anggota industri semen sebanyak 14 perusahaan. Kami akan menyampaikan secara umum, jadi mungkin bukan batu bara aja Pak, tapi masalah lain mungkin yang menjadi kendala industri semen di Indonesia. Tapi sebenarnya 60% udah disampaikan oleh Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Perindustrian jadi saya cepat aja gitu. Jadi, pada prinsipnya akan saya sampaikan mengenai masalah tadi, masalah *oversupply*, masalah batu bara dan masalah emisi yang penting di sini.

Nah, jadi pertama mungkin bisa tampilkan *slide*-nya ya mohon maaf atau belum siap?

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Mana *slide*-nya?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Dari industri semen. Jadi sambil menunggu, jadi kami laporkan Bapak Pimpinan rapat bahwa.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Tunggu aja, Pak. Tunggu, tunggu ditampilkan. Soalnya biar temen-temen yang di alam ghaib bisa ikut, bisa ikut lihat.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Oh iya, bisa lebih. Loh, udah di tadi sudah disampaikan ke Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oh, ini mungkin saya ini rasa semen ini bisa cepat *tickening time*-nya, Pak.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Udah disampaikan Bu, itu sejak kemarin eh sudah sejak tadi pagi itu ya oleh kepada Pak.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Jadi *thickening time*-nya itu terlalu cepat, jadi terlalu cepat beku dia. Keras, mengeras. Kalau di kita dia industri perminyakan itu juga ada semen-semen, Pak.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Malah saya cetak itu mintanya 25 *slide*, Pak. Nah itu kami sampaikan juga. Mungkin udah terima semua, Bapak/Ibu yang di sini.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Udah ada.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Oh iya ya, kalau gitu mungkin yang di *offline*, *online* ga bisa lihat ini ya.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ga pa pa, Pak. Masa' ga ada? Emang ga ada? Ini jangan sampe gara-gara ini kita bubar rapat nih, Pak. Soalnya ini penting sekali semen ini, Pak.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Iya tadi kepada Bapak Sekretaris DPR, Pak Misbah tadi saya sampaikan, Pak Misbah Hidayat, kami sampaikan datanya supaya bisa dimasukkan dalam presentasi.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Lagi *on the way* nih, Pak. Bisa, Mas?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Bisa? Oke.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ga pa pa kok, Pak. Kita waktu panjang nih, Pak. Ini rapat terakhir ga ada lagi. Jadi sampe jam 6 pun masih amanlah. *Insha Allah* Pak Nasir setia menunggu. Beliau ini Pak, sudah pakai baju khusus, Pak. Untuk menyambut semen. Oke, *alhamdulillah*. Wah sama loh, itu kan motif-motifnya mirip kayak bajunya, Pak Nasir. Ini jangan-jangan udah janji-janji nih semen nih.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Itu gambar yang di bawah itu simbol dari anggota, Pak. Kita ada 14 pabrik semen di Indonesia luar biasa.

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN/F- PG/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke, silakan, silakan Pak Widodo.

Lanjut, Pak.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Baik.

Jadi, kami laporkan bahwa mengenai kapasitas, Pak. Ini terjadi penggonjang-ganjing kemarin bahwa seakan-akan asosiasi menyampaikan suatu yang dibesar-besakan. Padahal, itu adalah suatu hitungan secara teknis ya. Jadi, kami sampaikan bahwa pedoman kapasitas daripada Indocement untuk memproduksi adalah jumlah klinker yang diproduksi, Pak. Jadi, klinkernya bahkan setengah jadi, itu nanti akan dicampur sesuatu material tambahan gypsum apa, *copper slag*, *fly ash*, sehingga menjadi semen. Nah, itu kira-kira campurannya itu 30%, Pak nah itu. Jadi, kalau kapasitas 81,7 di situ, kalau dibagi 0,7 itu kemampuan untuk memproduksi semen itu adalah 115,9 juta ton. Tadi makanya saya sampaikan, perkiraannya itu sekitar 116 juta ton. Nah, ini ada dari pihak lain.

Loh kok banyak sekali, kan klinkernya cuma 81 kali 1,3 kan cuma 90, bukan gitu ngitungnya itu. Nah, ini berkat inovasi daripada anggota memproduksi semen ramah lingkungan, Pak Ketua. Jadi, dengan semen ramah lingkungan itu akan mem-*backup* penurunan gas rumah kaca, karena yang menimbulkan emisi adalah memproduksi klinker tadi Pak, bahan setengah jadi tadi karena akan dibakar, kemudian butuh batu bara. Batu bara kalau dibakar keluar emisi GRK. Kemudian industri semen itu bahan bakunya batu kapur, Pak Ketua. Batu kapur kalau dibakar Pak, itu kira-kira 400% itu keluar CO₂-nya, jadi isinya IPPU, Pak. Jadi, emisi yang ada di cerobong

prosentasinya itu adalah kira-kira Pak 55% itu adalah hasil pembakaran batu kapur bahan baku, 35% adalah hasil pembakaran batu bara, yang 10% adalah energi listrik dan solar yang ..(suara tidak jelas)... Itu kira-kira, Pak.

Jadi, itu dasar emisi dan kami sudah melakukannya ya nanti akan kami sampaikan di belakang. Nah, ini sementara menurut *slide* ada tadi saya sampaikan produksi klinker adalah merupakan tolok ukur berapa kapasitas untuk bisa memproduksi semen, itu 116 juta ton. Saat ini Pak dalam negeri itu hanya sekitar 65 juta jadi hampir separonya Pak ya, mungkin 55%. Kemudian ada bantuan ekspor Pak, itu sekitar 11,5 juta ton. Sehingga, total produksi semen dalam negeri ditambah tadi ekspor itu sekitar 77 juta ton atau kira-kira itu sekitar 68% itu kira-kira ya dengan ada ekspor.

Nah, itulah kenapa kita menurun sekali utilisasi, karena bulan Oktober, November, Desember ekspor kita anjlok turun. Bahkan Semen Nusa Grup bulan Desember dan Januari tidak ada ekspor, karena harga batu bara itu 1,2 juta ton per ton gitu, sehingga Desember nol itu semen Indonesia, Januari ada sebagian yang harus kontrak. Nah, ini yang kendala terhadap penurunan utilisasi akibat eksportnya menurun ini. Nah, ini kira-kira.

Kemudian kita lanjutkan. Ini saya sampaikan agak detil Pak mengenai kondisi kapasitas semen di, di *region* Pak, kami bagi Sumatera, Jawa, Kalimantan itu supaya melihat bagaimana sih kondisi setiap pulau, kondisi pabriknya itu berapa persen. Contoh di Jawa, Pak. Di Jawa itu paling banyak Pak ada, ada 7 merek, Pak. Dari semua investasi Jawa, karena apa? Karena di Jawa itu kebutuhan semennya 55% dari kebutuhan nasional. Kenapa tinggi? Karena penduduk Jawa itu 160 juta ton, semua butuh rumah, Pak. Nah itu, sehingga di Jawa itu sekitar 55% konsumsi semen itu di Jawa.

Nah, ini terbukti bahwa realisasi daripada Jawa itu adalah 30, 39 juta Pak ini dari, dari, dari konsumsi sekitar 70 jadi hampir 50%. Namun, kapasitasnya itu sekitar 68% Pak di Jawa itu, 68 juta Pak, tapi permintaan dalamnya di Jawa hanya 39 juta jadi kelebihan sekitar 25 juta Pak di Jawa aja. Itu yang di kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke, ke Sulawesi itu Pak dia. Jadi, kalau nggak gitu ya, bayangkan kalau 5 pabrik jalan 3 pabrik kan repot utilisasi ga mungkin ya. Nah, itu kira-kira kalau di Jawa. Semua investasi Jawa, sehingga sekarang dampaknya kelebihan kapasitas sekitar tadi saya sampaikan 55% kelebihan kapasitas di Jawa.

Kemudian di Sumatera Pak itu berikutnya di gambaran agak-agak detil sedikit. Di Sumatera Pak ada 3 pabrik, Pak. Ada Semen Aceh, Semen Padang semen yang tertua di Indonesia tahun 1910, kemudian ada Semen Baturaja. Kapasitas semen di Sumatera itu sekitar, sekitar 16 juta, permintaan di Sumatera itu 14 juta jadi ada kelebihan 2 juta, tapi bukan berarti pabrik yang di Sumatera itu makan itu, bukan Pak. Karena dari 14 juta yang itu pasti dimakan yang dari Jawa, Pak. Semen Tiga Roda jual di sana, Semen Cibinong juga jual di sana, Merah Putih jual di sana, sehingga dari dari 14 juta Semen Baturaja, Padang dan Aceh hanya memakan kira-kira 60%, yang 40% itu pabrik dari Jawa mengirim ke sana. Jadi memang ini bedanya 2 juta tapi bukan berarti pabrik di sini akan, akan membawa semua produk konsumsi yang ada,

sebagian di, di jual dari, di kirim dari Jawa karena Jawa tadi kelebihan 35 juta ton kelebihan. 35 juta ton ini sama dengan 12 pabrik Pak, kelebihanannya di Jawa ini. Nah itu kira-kira gambaran di Jawa.

Kemudian Kalimantan, Pak. Kalimantan ini agak ironis ya. Kalimantan itu kapasitas daripada pabriknya sekitar 6,7 Juta, karena kapasitas klinkernya itu 4,7 juta dibagi 0,7 itu gerakan 6,7 juta. Tapi, Pak di Kalimantan itu ada, ada 3 juta ton itu *grading plan* dari pabrik yang ada di Jawa. Ada *packing plan* sebanyak kira-kira ada 9 *packing plan*, Pak. Di Pontianak aja ada 5 *packing plan*, semua merk ada di situ. Kemudian di Sula, Kalsel itu ada dua pabrik Semen Gresik sama Semen Bosowa. Kemudian di Kaltim itu ada *grading plan* 1 dan *packing plan*-nya 3 Pak, ada Semen Gresik, Semen Tonasa dan Bosowa. Jadi sebenarnya, kondisi kapasitas di, di Kalimantan itu ada sekitar 9,8 juta, permintaan baru 4,2 juta Pak, separuhnya. Itu yang kemarin kan dari asosiasi menyayangkan kenapa masih diberi izin pabrik di situ gitu loh Pak, walaupun apa walaupun alasannya untuk ekspor. Nah, ini. Siapa yang bisa mengawal ekspor, siapa penjualan dalam negeri. Inilah dilemanya, sehingga di Kalimantan ini pabrik di Sulawesi terancam, karena tidak bisa mengirim ke sana, karena ada pabrik baru di sana.

Padahal di Sulawesi, tolong di Sulawesi ini paling parah Pak, Sulawesi ini. Sulawesi ini ada tiga pabrik Pak, ada Semen Bosowa, Semen Tonasa dan ada Barukon Semen di Sumatera Utara. Kapasitasnya itu..(suara tidak jelas).. itu 11 juta ton, itu kalau dijadikan klinker itu 15,7 juta ton. Permintaan di Kaliman, di Sulawesi hanya 6,9 juta ton atau 7 juta ton dan sebenarnya di Sulawesi itu kapasitasnya itu eh utilisasi hanya 50% karena kapasitasnya itu 15,7 permintaan dalam negerinya hanya 6,4 nah ini, ini. Inilah kenapa Bosowa dan Tonasa pasarnya juga ada di Kalimantan, gitu loh. Jadi dikirim Kalimantan, jadi Kalimantan bangun pabrik baru ya mungkin Bosowa tetap di sana. Padahal kami laporkan Bosowa itu adalah perusahaan murni nasional, murni swasta, anak pemerintah daerah. Itu sekarang hanya operasi kira-kira 60% utilisasi. Jadi kira-kira kalau dua pabrik operasinya ya 1 pabrik kadang-kadang 2 pabrik gitu Pak, itu kira-kira dilema terjadinya kami akan agak keberatan, itu kalau di Kalimantan ada pabrik baru gitu. Itu kira-kira yang di Sulawesi kelebihan kapasitas kira-kira 50% juga dengan kapasitas 14 juta permintaan baru 7 juta gitu ya.

Kemudian selanjutnya, nah ini memang belum ada pabrik dia hanya di Kupang namun ini semua *display* dari Jawa Timur ya dari Semen Gresik, Semen Tora, Semen Tiga Roda, semua ada *packing plan*-nya juga Pak, di Bali ada dua *packing plan*, di NTT juga di Nusa Tenggara Barat ada *packing plan* dan di Kupang juga ada pabrik 1, ini di Nusa Tenggara. Lanjut.

Kemudian yang di Nusa Timur tadi. Di Nusa Timur itu kapasitas luas Pak, tapi permintaannya hanya 2 juta Pak, kira-kira itu hanya 3% dari permintaan seluruh nasional. Ini juga ada pabrik 1 di Manokwari, kapasitas sekitar ya sekitar 1,5 juta ton, kemudian juga di situ ada *packing plan* - *packing plan* dari Semen Indonesia di Sorong, kemudian di Halmahera ada Bosowa sama Tonasa, ada Conch. Nah ini saya kira cukup untuk menyuplai di, di Irian Jaya. Ini kira-kira gambaran daripada persemenan, per *region*, per pulau di mana

rata-rata setiap pulau sudah *over* kapasitas yang luar biasa, yang paling parah adalah di Sulawesi hanya 50% dan di Jawa hanya 45%.

Ini terakhir mengenai apa realisasi konsumsi Pak, kami dilaporkan. Jadi untuk ekspor dan domestik ya. Domestik itu tahun 2020 itu turun 10,7% tahun 2020 akibat pandemi, sekarang sudah lumayan *alhamdulillah* naik hampir 6% jadi tentunya masih kurang Pak kalau dibanding tahun sebelum pandemi itu sekitar 70 juta permintaan dalam negeri, saat ini baru 66 juta, jadi masih utang kira-kira 3,5 juta. Kita harapkan 2022 ini bisa *recovery* sehingga dalam negeri bisa sama dengan tahun 2020 eh 2019 maksud saya.

Ekspor sudah dijelaskan oleh Bapak Dirjen dan luar biasa, bahkan ini mencapai 11,5% eh 11,5 juta. Kalau tidak ada efek batu bara pada bulan Desember dan Oktober, kira-kira bisa 12,5 juta, Pak. Tapi semen Indonesia tidak ada ekspor sama sekali bulan Desember, bahkan Januari juga cuma 20% karena harga batu bara masih tinggi sekali tidak mungkin untuk ekspor dengan batu bara non-DMO itu 1,2 juta per ton semen..(*suara tidak jelas*)..di pabrik.

Kemudian ekspor, jadi totalnya ini lumayan Pak total bulan 2021 sudah 77,8 juta ini sudah sama dengan sebelum pandemi, ini sudah *recovery* tapi meningkat karena adanya ekspor kenaikannya sekitar dari 9 menjadi 11,5 ada kontribusi ekspor 2,5 juta ton sehingga kekurangan dalam negeri terhadap 2019 itu sudah *recovery* sehingga sudah sama dengan tahun 2019. Nah ini, harapan kami jadi anu jadi agak pesimis kalau harga batu bara DMO itu tidak lancar. Selama harga DMO tidak lancar, tidak ada opsi ekspor karena tidak ada untung bahkan rugi. Karena bayangkan Pak, harga batu bara dari 600 ribu, 550 naik menjadi 1,2 juta 1,3 juta. Tidak mungkin, karena konsumsi batu bara itu sekitar 35% dari biaya produksi. Jadi, dengan adanya kenaikan biaya produksi itu sekitar 35% apabila harga non-DMO dan ada DMO itu lumayan Pak jadi tinggal, kenaikan tinggal sekitar 15%. Jadi, walaupun ada DMO kenaikannya masih 15% biaya produksi. Jadi, bukan *free* bukan, Pak. Karena harga..(*suara tidak jelas*)..dengan harga DMO sekitar 800 ribu sebelum DMO itu sekitar 550 sampai 600 naik sekitar 50% masih. Jadi nah itulah kira-kira. Namun, *Insha* Allah dengan adanya DMO itu ekspor bisa kembali lancar walaupun *profitable*-nya pasti turun dari teman-teman, tapi namun untuk kenaikan utilisasi itu saya kira bagus, Pak Pimpinan.

Oke, kita lanjutkan aja. Ini adalah tadi sudah saya sampaikan mengenai kenaikan tahun 2021 Sumatera itu *alhamdulillah* Pak 2,5%, Jawa luar biasa 5,5%, Kalimantan 7,2%, Sulawesi 20% naik luar biasa, Bali, Nusa Tenggara relatif tidak ada kenaikan karena ya karena pariwisata belum jalan ya. Kemudian, Maluku sekitar 3,9% sehingga total *general*-nya ini dalam negeri naik hampir 6% 5,9%. Notabane, notabane tahun 2019 itu, 2020 turun 10,5% jadi masih utang Pak, masih utang kira-kira 4,5%.

Oke, kita lanjut. Saya kira ekspor sudah dijelaskan tadi sama Pak Dirjen bahwa *alhamdulillah* ekspor kita mencapai 11,6 dan memang yang terbesar adalah ekspor klinker Pak di Bangladesh ini. Jadi, ada kemarin waktu rapat ditanyakan apakah klinker itu dapat DMO. Kami mohon sekali Pak bahwa ekspor hendaknya tetep ada DMO, kalau nggak ada DMO saya yakin tidak ada

ekspor. Kalau tidak ada ekspor, utilisasi akan turun. Dari 6 dari 68 turun ke 55 begitu susah pabrikan semen kalau pabrikan hanya 55% dengan adanya ekspor tidak boleh ada DMO. Karena sebenarnya itu, itu kan kontribusi untuk tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen eh, Pak Dirjen ESDM bahwa ekspor batu bara itu ada nilai tambah dari PMD, batu kapur itu dari galian c-nya ada bayar kita, *clay* aja bayar. Galian untung itu tumpah darah, loh kok ga ada ekspor ya penggajian dari daerah ya turun apa, apakah gitu padahal moneter perdagangan juga naik dengan adanya ekspor sekitar 12 juta ton kali 40 dolar sudah berapa triliun itu ya pendapatan pemerintah dari segi perdagangan moneter. Ini maka kurang setuju kalau ekspor tidak dikenai DMO. Itu kalau saya itu salah kaprah, karena itu adalah kepentingan industri nasional dan pemerintah dalam perdagangan moneter dan pemerintah daerah akan mendapatkan galian c pak, pajak galian c, itu akan dapat juga. Itu kira-kira.

Kita lanjutkan saja proyeksi tahun, nah ini Pak. Pak Pimpinan ini ada gambar ya. Jadi, kalau kenaikan per bulan, per tahun 5% Pak itu sekitar 3,5 juta. Jadi, kalau kita kelebihan 35 juta Pak, itu kira-kira 10 tahun baru pas ya. Nah, *oke* jadi 10 tahun, tapi ngga boleh begitu karena bangun semen itu sekitar 3 tahun Pak, 2 - 3 tahun. Jadi, kalau 10 tahun dikurangi 2 tahun, itu kira-kira 8 tahun baru wajar, itu tidak boleh ada anu tambah baru.

Maka kami usul hendaknya ada, moratorium, Pak. Jadi, selama ini memang ada komitmen, tapi peraturan tertulis tidak ada, Pak. Itu yang kami dari anggota asosiasi masih prihatin. Karena, dengan tidak ada tertulis, peraturan tertulis dari pemerintah bisa aja nyelonong itu Pak, dasarnya apa dia melarang nah padahal dengan adanya moratorium Pak, itu pasti kami usul di sini moratorium diadakan sampai 8 tahun mendatang, karena kelebihan 10 tahun ini masih cukup, jadi *okelah* dikurang 2 jadi 8 tahun. Jadi, moratorium sampe tahun 2030 sampai 2029 itu kami usulkan pada Bapak yang mulia anggota DPR Komisi VII.

Oke Pak, ini selanjutnya adalah perkembangan kapasitas tadi disampaikan bahwa berapa sih kebutuhan, ini setiap pabrik ada Pak, kalorinya juga ada. Ini kira-kira tadi disampaikan Pak Dirjen antara 15 sampai 16 juta ton untuk pabrik semen. Ini termasuk ekspor tadi Pak. Jadi, ekspornya itu kira-kira 15% nah ini kira-kira, ini ada, Pak.

Kemudian, ini kami sampaikan juga Pak secara detail mana-mana pabrik yang sudah mendapatkan DMO harga DMO. Tadi, sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen itu Semen Indonesia Grup, Pak, Semen Padang, Tonasa, SPI itu sudah dapat kontrak DMO Pak. Walaupun, sampai sekarang juga stoknya masih relatif terbatas hanya sekitar 60%. Namun, sudah lumayan ya. Kemudian, Baturaja juga dapat, Bosowa dapat namun sisanya belum ada yang dapat Pak. Semen Tiga Roda itu pabrik terbesar nomor dua itu nggak dapat, belum dapat DMO. Kemudian, Merah Putih itu juga stoknya tadi saya tanya pimpinannya hanya sekitar 6 hari Pak, 4 hari 5 hari. Itu adalah produsen yang sangat gencar mengeksport semen, mengeksport semen dan klinker jadi kontribusinya Semen Merah Putih itu kira-kira 30% dari total ekspor itu dari Merah Putih, kemudian 60% gara-gara dari Semen Indonesia dan 10% dari yang lain. Ini, ini ada keterangannya Pak di samping ini adalah mana sudah

dapat mana yang belum Pak. Ini kira-kira anu tabelnya mungkin ya, Pak. *Oke* itu kira-kira mengenai realisasi.

Kemudian perlu kami sampaikan Pak, dasar karena apa, kami sangat mendukung kebijakan perindustrian dari ESDM, karena sebenarnya sudah ada kebijakan nasional mengutamakan mineral dan batu bara untuk kepentingan dalam negeri Undang-Undang Nomor 2 itu Pak ya. Kemudian, ada lagi prioritas batu bara sebagai sumber energi dan jaminan masukkan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Ada juga ini peraturan, ada PR apa ini ada, kemudian terakhir IUP ini juga ada harus mengutamakan kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri ini, ekspor dapat dilakukan setelah kebutuhan mineral dan batu bara dalam negeri terpenuhi. Ini sudah sesuai dengan kebijakan Kementerian Perindustrian dari kami eh Kementerian ESDM. Kami mewakili seluruh anggota sangat berterima kasih dan semoga Kementerian Perindustrian dan ESDM bisa melakukan kinerja dengan sebaik mungkin.

Kemudian, kesimpulannya Pak, secara singkat. Jadi, pertama, *oversupply* akan terjadi sampai dengan tahun 2030, kelebihan 35 juta ton peningkatan permintaan semen rata-rata hanya 5% sehingga atau 3,5 juta per tahun diperlukan segera, dikeluarkannya keputusan peraturan tertulis moratorium sampai dengan tahun 2028 karena pembangunan Bosowa perlu 2 tahun ya. Kemudian harga batu bara masih belum semua mendapatkan ke bagaimana skema DMO dari segi kemudian dari segi stok sebagian besar sudah membaik sekitar 50, 60 sampai 80% dari standar pengamanan. Semoga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan *support* dari Bapak-bapak yang mulia anggota DPR Komisi VII. Namun, kami terus terang kami laporkan, Pak. Masih ada yang teriak, Pak. Jadi Semen Merah Putih, Pak, tadi saya sampaikan masih 6 hari aja, kemudian konsumen itu juga teriak, kemudian juga masih ada di semen, semen anu Pak, semen baru Pak dari Cina Singa Merah itulah perusahaannya baru hanya cuma 3 hari 4 hari, ini lokasi Jember Pak, dia masih belum dapat DMO.

Kemudian DMO 90 dolarnya perlu diperpanjang sampai dengan 12 bulan lagi, mengingat harga ekspor batu bara masih tinggi belum jelas kapan berakhir. Untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian ESDM pada pelaksanaannya. Jadi, *reinforcement*-nya harus jelas sehingga perusahaan batu bara betul-betul me, me apa *me-supply* atau tertib terhadap aturan DMO yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Kemudian, persentasi kewajiban *supply* pengeksport batu bara agar dinaikkan minimal 30 sampai 35% untuk pengamanan kebutuhan. Kebutuhan industri dan PLN, Pak. Kalau cuma 25% Pak, kira-kira untuk PLN habis Pak ini, karena PLN kebutuhannya 135 juta semen dan pupuk itu sekitar 20 juta Pak, jadi harus ada sekitar 150 juta ini yang harusnya, makanya kalau 25% kelihatannya tidak, tidak bisa terpenuhi Pak ini.

Kemudian, nah ini Pak, kami sepintas aja Pak, di luar ini. Kebijakan ODOL, Pak, perlu diundur dari 2023 menjadi 2005 mengingat untuk persediaan tambahan mobil terhambat dengan adanya musibah musim panjang pandemi selama 2 tahun. Jadi, memang waktu tahun 2020 diputuskan 2023, kami kira 2

tahun 3 tahun cukup, ternyata sampai 19 tahun 19 diputuskan. Namun, 2 tahun kita bisa apa-apa, sehingga teman-teman asosiasi semua Pak itu memohon agar ODOL ini kiranya diundur sampai awal tahun 2025 seperti dari keramik, dari air min, asosiasi minuman dan asosiasi baja, dan lain-lainnya.

Yang nomor 6, industri semen secara aktif. Nah ini Pak, mendukung program pemerintah dalam melakukan kegiatan untuk penurunan emisi gas rumah kaca CO₂. Kami mendukung sekali Pak kegiatan itu dan sejak tahun 2016 sudah melakukan suatu gerakan-gerakan untuk ini yang di apa dimotivasi oleh Departemen Perindustrian melalui berbagai kegiatan antara lain Pak. Kami sudah melakukan inovasi dengan memproduksi semen ramah lingkungan. Nah itu, ini yang program pertama untuk menurunkan IPPU Pak untuk menurunkan emisi yang dikeluarkan oleh pembakaran batu kapur. Dengan adanya semen ramah lingkungan, kebutuhan klinker yang digunakan itu sedikit sehingga emisi yang keluar dari cerobong itu cukup banyak penurunannya. Kemudian meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif seperti payuanmas, sekam padi dan lain-lain sebagainya, RDF atau lim apa sampah, kemudian limbah P3 dan lain-lain. Itu kita lakukan untuk mengurangi penggunaan batu bara, karena batu bara sumber emisi yang dialami oleh industri semen.

Kemudian, kita membangun WHRG, Pak, *Waste Heat Recovery Generation*. Jadi gas panas yang keluar cerobong akan kita manfaatkan untuk kebutuhan pembakaran, pembakaran di, di anu Pak di pembangkit ya di *boiler* Pak itu. Sehingga, memproduksi *boiler* akan memutar turbin, turbin akan mengeluarkan listrik itu prinsipnya Pak. Sehingga, ini bisa mengurangi sampai 10% Pak kebutuhan listrik. Ini juga salah satu menurunkan gas rumah kaca, karena dengan menggunakan listrik itu otomatis PLN juga mengeluarkan emisi dari pembakaran batu bara.

Pada tahun 2020 telah berhasil menurunkan emisi CO₂ sekitar 10 juta ton, Pak. Kami sudah turun dari standar yang ada per tahun Pak, per bulan kita sudah menurunkan 800 ribu ton menurunkan berkat program yang telah kita lakukan. Sehingga, kemudian atau sekitar 10% kita turun dari kondisi standar yang ada NDC gitu ya, *National Determined Contribution* ya.

Kemudian, yang terakhir nih Pak, program ekspor sebesar 15% dari total konsumsi penjualan harus didukung oleh harga DMO kami katakan tadi apa. Apabila, harga masih non-DMO atau di atas 1,2 juta ton per per ton batu bara, maka kemungkinan tidak ada lagi ekspor tahun 2022, sehingga *utility of break* akan *drop* lagi menjadi sekitar 55% dari sebelumnya sekitar 69%. Ini akan sangat merugikan industri semen dalam negeri dan program komoditi, komoditi ekspor bagi pemerintah.

Itu saya kira Bapak Pimpinan apa yang kami sampaikan. Semoga menjadi bahan masukan. Kami mohon semoga dari Bapak Pimpinan dan semua anggota memaklumi kesulitan daripada industri semen saat ini. Istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga Pak, sudah *oversupply* tiba-tiba batu bara naik ketimpa lagi.

Demikian, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Bapak.

Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Dirjen IKFT, kemudian Pak Dirjen Minerba dan Pak Ketua Asosiasi Semen Indonesia. Kami tadi izin ganti Pimpinan tadi tadi Pak Sugeng ke Pak Maman dan langsung pindah ke saya lagi. Ini *over handle* saya supir tembak, Pak.

Sedikit mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab. Saya sendiri agak sedikit apa namanya *confuse* tadi dari pembahasannya mohon izin Pak Dirjen saya minta interaktif sedikit. Kalau yang DMO 90 dolar ini kalori 6.322 ya, betul ya, nah kalau saya lihat di dalam *list* ini kan rata-rata 4.000 ya 6.322 hanya dikali 4.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

4.200 ya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Berarti itu masih masuk di dalam harga yang 70 dolar.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Ini di luar, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oh di luar ya.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

90 dolar itu sendiri.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Jadi 90 dolar maksimum 6.322 betul?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Betul Pak betul. Kalau di-review ke batu bara kira-kira 45 dolar, 50 dolar, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Kalau apa?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Kira-kira begitu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Engga, maksudnya sekarang dengan, dengan kalori yang rendahnya ambil berapa, harga berapa DMO-nya?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

DMO-nya ya konfersinya temen-temen sekitar 47 dolar Pak atau 50 dolar.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Begitu, Pak Dirjen ya?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Iya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke. Iya ini saya agak, tadi agak bingung aja tadi angkanya jadi tidak sama dengan DMO yang PLN Pak ya, tidak ya. *Oke.* kepmen khusus ya. Nah, kalau pengurusannya sendiri itu mereka berkontrak dengan IUP langsung atau dengan *trader*?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Tidak diatur secara khusus Pak, tapi kalau kita arahkan langsung kepada IUP, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oh langsung pada IUP. Nah ini benar langsung pada IUP. Ya, nah silakan teman-teman yang lain untuk bisa bertanya saya *rolling* dari partai mungkin ya, boleh ya. Kebetulan dari PDI Perjuangan tidak ada yang kelihatan di sini. Kita hadirkan yang fisik dulu dari Partai Golkar mungkin Bu Roro silakan.

F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang hadir secara fisik maupun *virtual*, dan

Di sini para mitra kerja kami mulai dengan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Bapak, dan

Dirjen Minerba, lalu kemudian juga dari apa, Ketua atau Ketum dari Asosiasi Semen Indonesia.

Terima kasih tadi ada beberapa hal yang telah disampaikan kepada kami dan saya lihat ada beberapa tema besar ya. Mungkin *step by step* saja supaya saya juga bisa dibantu untuk mengerti.

Jadi, yang pertama kalau presentasi pertama itu kan dari dirjen dari Menperin ya, tapi intinya mungkin semuanya bisa membantu gitu dalam arti kata yang isu yang disampaikan pertama itu kan mengenai ataupun berkaitan tentang *oversupply* ataupun *overcapacity* pada industri semen ya. Karena, tadi dinyatakan pada tahun 2021 mencakup kurang lebih 47 juta ton dengan utilisasi di sekitar 58%. Nah, maka saya rasa ada dua faktor ya yang bisa kita apa fokuskan baik itu dari segi perencanaan *supply*-nya lalu kemudian juga kebutuhan ataupun kondisi permintaan jadi *supply and demand*-lah kurang lebih seperti itu.

Nah, maka pertanyaan pertama saya adalah apa sih sebetulnya yang dijadikan dasar ataupun basis daripada perencanaan *supply and demand* tersebut. Mungkin garis besarnya saya ingin mengetahui itu terlebih dahulu.

Lalu kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan beberapa pemaparan setelah itu terkhusus di apa dengan adanya *oversupply* lalu kemudian salah satu solusinya adalah kita mengekspor ke beberapa negara tadi sudah dipaparkan juga. Namun semenjak Covid kasus Covid ini semakin menurun otomatis ternyata ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan batu bara bagi industri semen ya secara keseluruhan. Itu yang saya tangkap pada penjelasan yang telah disampaikan terkhusus pada kuartal 2 tahun 2021. Nah, maka saya ingin mengetahui, yang pertama mengenai emisi gitu, dari segi emisi yang tadi juga sudah disampaikan. Pernah tidak sih dipertimbangkan yang tadinya memang pada dasarnya salah satu bahan baku utama ya yang dibutuhkan oleh

industri semen ini kan batu bara ya. Namun, relevansinya terhadap tadi emisi karbon, lalu kemudian relevansinya terhadap bagaimana kita komit terhadap *The Paris Agreement* dengan pengurangan emisi baik itu sebesar 29%, dan lain sebagainya. Pernah tidak sih dipertimbangkan untuk menggunakan energi baru terbarukan untuk hal-hal seperti ini. Nah, ini juga ingin saya pertanyakan.

Lalu kemudian yang terakhir, yang terakhir mengenai harga jual batu bara. Nah, saya itu sebetulnya agak *confused* ya, Ketua ya. Maksudnya ini kan berarti batu bara ini dinikmati oleh berberapa pihak. Jadi, untuk kebutuhan listrik, lalu kemudian juga untuk kebutuhan industri yang ternyata berdasarkan kepmen yang telah di apa disahkan kemarin itu yang berlaku hingga saat ini, setiap *entity* yang menikmati batu bara ini juga mengalami ataupun menikmati harga-harga yang berbeda sesuai dari kalori yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua gitu. Nah, maka saya ingin menanyakan pada pihak industri gitu, apa sih aspirasinya dalam arti kata apa yang dibutuhkan. Apakah dengan harga yang sesuai kepmen kan 90 dolar ya. Nah, apakah itu dibutuhkan agar bisa lebih rendah lagi ya, supaya kita itu tau gitu harapan besarnya itu seperti apa. Dan walaupun demikian bagaimana bisa dijamin dalam arti kata dengan harga batu bara yang lebih rendah otomatis itu akan ber *colored* ataupun me, mengakibatkan ya harapannya ya bahwa produksi itu bisa semakin tinggi ya kan, lebih produktif. Nah, itu bagaimana dengan *end user*-nya gitu, dampaknya seperti apa. Itu juga sesuatu hal yang ingin kita pertanyakan.

Dan dari segi pengawasan Pak Ketua, mungkin nanti kita juga bisa memperdalam, karena tadi disampaikan di presentasinya Kementerian Perindustrian juga bahwa berkaitan mengenai harga ini ada beberapa perusahaan sesuai dengan skema kepmen. Misalnya contoh kecil Semen Gresik, lalu kemudian Semen Bosowa, Semen Padang, semua ini sudah mendapatkan harga batu bara yang sesuai dengan skema kepmen. Namun ada beberapa yang, yang belum mendapatkan harga sesuai skema itu, ada beberapa juga Ketua apa misalnya ya Cemindo Gemilang, Sinar Tambang Arthalestari, dan lain sebagainya.

Nah ini kan, berarti fungsi DPR itu kan harus juga memastikan bahwasanya setiap perusahaan yang sebetulnya berhak untuk menikmati apa namanya hasil daripada peraturan yang telah dibentuk itu mereka juga harus bisa apa bisa mengalami hal yang sama sesuai dari perusahaan-perusahaan tadi yang sudah kita sampaikan. Nah ini fungsi pengawasan juga harus kita jalankan, kalau butuh kita panggil atau mungkin nanti bisa mendapatkan penjelasan lebih rinci lagi dari Kementerian Perindustrian, agar kita tahu di lapangan permasalahannya itu seperti apa.

Mungkin sekian dulu ya dari saya.

Terima kasih, Ketua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Terima kasih, Bu Roro. Ya kalau Bu Roro pasti yang dikejar itu adalah emisi Pak, EBT. Emisi itu udah emisi dan EBT, dua itu yang pasti dikejar oleh Bu Roro. Ya nanti mungkin bisa dijawab.

Selanjutnya, silakan dari Gerindra. Siap, Bang Barna. Silakan Bang Barna.

F-P.GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan, beserta
Seluruh anggota DPRRI Komisi VII yang berbahagia,
Bapak/Ibu yang hadir pada saat ini.

Kalau saya melihat hari ini pada prinsipnya bagaimana stabilitas harga dan pasokan, itu kuncinya. Jadi, tuntutananya kepmen ini harus menstabilkan harga dan pasokan kira-kira seperti itu. Satu hal yang menarik sebenarnya ini perusahaan pemerintah itu selalu menjamin harga pasokan bagaimana semua ini stabil harganya. Tapi, saya sebagai wakil rakyat terus terang saja akhir-akhir ini malah semen di daerah itu naik. Ini jadi catatan tersendiri.

Kalau saya berpikir sekarang, kenapa semen bisa naik, seharusnya kan tidak naik karena ini jaminan. Demikian juga mungkin pupuk, apakah karena distribusi atau apa ini sebenarnya. Nah, ini juga saya minta jaminan hari ini khusus kepada asosiasi, ketika kepmen ini dikeluarkan, peraturan ini dikeluarkan, moratorium dikeluarkan, semata-mata bagaimana stabilitas harga, tetapi di satu sisi apalagi akhir-akhir tahun biasanya besi dan lain sebagainya, mohon maaf ini besi baja naik kadang-kadang gitu karena memang diperlukan, akhir tahun biasanya seperti itu, termasuk semen.

Nah, hal ini juga mungkin kepada Pak Dirjen, ini menekankan kepada asosiasi agar jangan sampai terjadi kenaikan harga di daerah, di bawah, di masyarakat. Karena saya juga pelaku masyarakat jualan toko besi Pak, sama Pak jadi tau Pak, hari ini naik Pak semen itu. Jadi, sekali lagi saya hanya minta itu, saya sebagai rakyat, wakil rakyat dan tau harga semen hari ini naik apalagi akhir-akhir tahun biasanya besi, pupuk dan lain sebagainya. Ini suka naik. Nah, ini sekali lagi kepada Pak Dirjen, saya hanya berbicara *oke* kita sepakat, supaya stabilitas harga pasokan ini juga stabil. Tetapi, di satu sisi harga untuk masyarakat ini harus lebih stabil.

Saya rasa itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Bang Barna.

Berikutnya dari Fraksi Nasdem, ya Pak Rico silakan.

F-P.NASDEM (RICO SIA):

Makasih, Pimpinan. Terima kasih rekan-rekan semuanya baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Terima kasih untuk paparan yang sudah diberikan oleh Pak Dirjen baik ILMATE maupun Pak Dirjen dari Minerba, ESDM juga Pak Ketua Asosiasi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Fraksi Golkar maupun Gerindra, saya juga berpendapat yang sama, mungkin tinggal menambahkan satu bahwa, pada saat kami kunjungan Bosowa, Pimpinan, di sana memang sudah dibahas terkait dengan hal ini.

Yang menjadi perhatian saya juga sudah disampaikan oleh tadi Pak Ketua bahwa, eh Pak Ketua Asosiasi bahwa pembangunan pabrik yang di Kalimantan memang kita sangat butuh investasi, sangat-sangat butuh investasi, juga kita sangat-sangat butuh bahwa ada pemasukan devisa. Namun, memperhatikan bahwa kita punya *oversupply* semen tadi dan kesempatan yang harus diberikan kepada pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Indonesia ini, maka mungkin kebijakan membangun di Kalimantan tadi bisa sementara ditunda.

Bayangkan saja kalau mereka boleh mengekspor dengan gampang karena punya pasar menguasai pasar sendiri lalu kemudian yang menjadi korban adalah kita punya pengusaha-pengusaha lokal dalam negeri. Sangat-sangat disayangkan apabila memang ini nantinya diizinkan berjalan. Bukan berarti saya pribadi tidak setuju, tapi lebih kepada memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal agar mereka kemudian bisa *recovery* dulu dan kemudian bisa stabil dulu, lalu mari berkompetisi.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Salam sejahtera buat kita semua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Iya, terima kasih Pak Rico Sia.

Selanjutnya dari PKB.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Bu Ratna Juwita.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan,
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII, dan
Teman-teman TA komisi juga,
Yang kami banggakan Pak Ridwan,
Pak Muhammad Khayam,
Pak Widodo Santoso, beserta
Segenap jajarannya yang hadir.

Terima kasih Pak atas pemaparannya dan kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Asosiasi Semen Indonesia, karena saya tadi melihat bagaimana upaya dari teman-teman pengusaha ini untuk bisa terus meningkatkan utilitas industri bagaimanapun kondisi yang ada di Indonesia begitu. Itu perlu kita apresiasi.

Dan juga bagaimana tadi di kesimpulan nomor 6, Bapak juga sudah menjelaskan ya upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di asosiasi dalam rangka mendukung *national determined contribution* itu sangat luar biasa kalau menuju ke *net zero emission* di 2060 nanti kami juga sepakat Pak, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam bentuk inovasi dari sisi teknologi ya itu sungguh sangat luar biasa.

Cuman kami nitip Pak disampaikan juga kepada anggotanya terutama pada beberapa waktu yang lalu pas kami kunjungan ke Jember, Ketua. Itu pak bupati curhat kepada kami kalau koordinasinya itu kurang baik begitu antara perusahaan semen yang ada di sana dengan pemerintah daerah. Mungkin Bu Lana juga ada, ya Bu Lana? Oh Bu Lana nggak diajak sama Pak Dirjen, oke. Bu Lana waktu itu yang menyertai kami Pak Dirjen, Bu Lana juga paham persis jadi semoga Pak, tadi kan Pak Ketua menyampaikan bahwa semangat dari anggota asosiasi ini untuk meningkatkan pendapatan daerah itu luar biasa, Ketua. Tapi kalau misalnya itu tidak didukung dengan komunikasi

serta koordinasi yang baik, saya pikir percuma juga, Ketua. Jadi, harus benar-benar sinerginya itu luar dalam begitu.

Yang berikutnya, Pak. Kami juga sepakat bahwa semen ini adalah sebuah produk yang sangat dibutuhkan hari ini dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang memang sedang digenjot abis oleh Pak Presiden Jokowi begitu ya, sehingga mungkin tidak kira-kira ini ada Pak Dirjen IKFT, ada Pak Dirjen Minerba, gimana ya caranya mengkalkulasi kalau permohonan dari teman-teman asosiasi ini dikabulkan begitu. Jadi kita juga ingin men-*support* kalau misalnya DMO ini mungkin bisalah ditambahkan untuk pengusaha semen yang ada di Indonesia, utamanya yang lokal. Saya garis bawahi, utamanya yang lokal. Nanti kalau misalnya ada lebih bolehlah itu yang investasi dari luar itu boleh dikasih, tapi kalau misalnya kalkulasinya kurang mumpuni Ketua, utamakan yang lokal dulu begitu.

Yang berikutnya, ini mungkin ke Pak Dirjen IKFT ya. Pak, sudah disiapkan belum Pak, strategi alternatif untuk menyikapi melimpahnya pasokan yang semacam ini, karena saya khawatir kalau misalnya ini negara tidak mengambil posisi dalam rangka distribusi di hal regulasi untuk pengaturan perwilayah ini, saya khawatir yang tadi disampaikan Pak Ketua Asosiasi untuk yang wilayah Kalimantan dan Sulawesi itu mereka beneran bisa *collapse* Pak. Jadi, kalau misalnya pemerintah dalam hal ini masih memberikan izin untuk perusahaan-perusahaan semen baru dibangun di Indonesia dalam kondisi yang begini, berarti ada *quote and quote*, Ketua. Kita harus benar-benar mencermati masalah ini. Orang ini sudah *overcapacity* loh dengan utilitas 58% kasihan mereka. Itu investasinya gede luar biasa. Jadi, kita juga harus bisa memastikan kita nggak cuman mencari investor, tapi bagaimana memelihara investasi yang sudah ditanam dan sudah berjalan yang ada di Indonesia. Ya kira-kira diatur per wilayah seperti pupuk yang tadi disampaikan oleh senior kami Pak Subarna gitu juga bolehlah, untuk menjaga distribusi per masing-masing wilayah.

Yang berikutnya untuk Pak Dirjen Minerba. Di halaman 11, Pak. Tadi sudah disampaikan data bahwa sebenarnya kalau masalah bahan baku *supply and demand* itu sudah di posisi yang bagus begitu ya. Ada perusahaan yang dekat dengan bahan baku dan sudah disampaikan kepada Pak Ketua Asosiasi sehingga bisa *engage* begitu. Cuman saya juga berharap Pak Dirjen Minerba ini mau membantu Pak Dirjen IKFT untuk menyelesaikan permasalahan *oversupply* ini, Pak. Ya jadi bagaimana Pak Dirjen Minerba juga bisalah membantu untuk memberikan solusi supaya *supply*-nya ini loh sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini.

Yang berikutnya, saya juga berpikir Pimpinan, bahwa kita membutuhkan tata niaga yang lebih baik dan lebih transparan begitu ya sehingga teman-teman asosiasi ini tidak merasa dirugikan. Pemerintah juga kondisi keuangannya bisa diselamatkan dan akhirnya masyarakat mendapatkan harga barang yang super kompetitif semuanya senang begitu *win-win solution*-lah untuk semuanya begitu.

Yang terakhir saya nitip untuk Pak Dirjen IKFT. Izin Ketua, ini keluar dari topik sebenarnya, tapi karena ini permasalahan dari dapil rekan sehingga kami

harus menyampaikan. Kemarin soalnya Pak Dirjen saya WA nggak dibalas. Jadi, harus saya sampaikan saat ini. Saya minta segera dilaksanakan survei atau inspeksi atau peninjauan atau apapun namanya Pak ke PT Rayon Utama Makmur yang lokasinya ada di daerah Muter Sukoharjo. Ini bertahun-tahun Pak, warga masyarakat di sekitar itu mengeluhkan adanya bau dari limbah industri tersebut yang sudah sangat mengganggu. Bahkan, sampai menyebabkan beberapa penduduk itu sesak nafas dan mereka mengklaim sudah dilaporkan ke manapun, tapi tidak pernah ada tanggapan sampai dengan hari ini. Jadi, kami mohon Pak Dirjen ini segera direspon, karena tidak ada artinya Pak, industri tanpa kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat di sekitarnya.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Walaikumsalam, Mbak Ratna Juwita.

Selanjutnya dari Fraksi Demokrat ada, kosong. PKS.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Via Zoom, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

PKS.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Ya dari *via Zoom* Pimpinan, bisa terdengar? Hallo? Ya dari *via Zoom*, apakah bisa terdengar?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke nanti saya temen-temen yang ada di sini, nanti kita masukkan dalam sesi yang dunia maya.

Dari PAN nggak ada ya? Ya dari PAN silakan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Dirjen ESDM, dan
Perindustrian, dan
Ketua Asosiasi Semen Indonesia yang kami hormati.

Persoalan mendasar ada 2 persoalan saya pikir ya sebagaimana apa yang telah disampaikan teman-teman. Terhadap *shortage*-nya pasokan batu bara yang mempunyai implikasi utilisasi daripada produksi kita turun. Tetapi, semacam paradoks kalau ini pasokannya juga dicukupkan ini akan terjadi *oversupply*. Jadi, ini ada pilihan ya, pilihan yang harus ya paling tidak yang harus urut apa yang harus kita ambil solusinya di atau masukan yang akan kita ambil sebuah keputusan ke depan.

Untuk kebutuhan nasional Pak, Pak Widodo lebih kurang 70 juta ya Pak, kebutuhan nasional pada posisi masa Covid. Izin, Pimpinan sebelum Covid 70 juta. Nah, sementara kapasitas kita kalau digenjot sekitar 116 ya. Ekspor kita hanya sekitar 10%. Nah, asosiasi mengadu ke DPR kan begitu ya Pak, persoalan *oversupply*. Saya pikir, jangan salahkan DPR, Ketua. Kami kembalikan salahnya pemerintah yang mengeluarkan izin, Pak Wid, kita kan tadi apa 2013, 2014 kita minta moratorium tapi itu belum lagi ugal-ugalan.

Nah, hari ini kan pemerintah khususnya Menteri Investasi termasuk ugal-ugalan. Nah Pak, Pak Dirjen ini kan belum moratorium ya, Pak. Belum, Pak? Belum tertulis toh, tetapi dipersulit izinnya, dipersulit izinnya kalau boleh dikeluarkan izin pada daerah tertentu itu pun disesuaikan dengan kemampuan memberi izin dan peminta izin. Ini kan persoalan. Nah hari ini Bapak menjerit *oversupply* sekitar 47 juta ton. Nah, mengadu ke DPR hari ini bagaimana DMO dinaikkan, supaya produktivitas kita bisa lancar ya dan diharapkan orientasinya ekspor. Ketika orientasi ekspor kita dukung, tapi tidak mampu bersaing Ketua, karena *cost* pendirian pabrik di Indonesia sangat luar biasa 1,5 kali pendirian pabrik yang berada di Thailand. Jadi, kalau nanti dijadikan penyusutan pabrik, kita kalah. Baik juga pabrik yang pabrik yang dari Jerman. Nah, ini kan persoalannya di situ. Nah Pak Widodo, saya pikir bisa lebih arif kan gitu, bisa lebih arif bukan sekedar persoalan pasokan batu bara saya pikir kalau raker yang lalu kita telah mendorong itu untuk 30% untuk PLN. Nah, ini untuk semen ya.

Nah, saya hanya ingin bertanya kepada Pak Wid ya, kalau nanti ini kita berikan pasokan. Tata niaga persemenan di republik ini tidak diatur Pak, ini pasar bebas ujung-ujungnya. Semen nanti bisa berantem lagi harganya. BUMN menguasai sekitar 51 juta dari, dari 4 BUMN. 51 juta ini mereka bisa melakukan kartelisasi, toh juga hari semen di semen hari ini Ketua kajian daripada komisi persaingan perdagangan usaha ini kan ada kartelisasi sesungguhnya. Hanya nanti diredam kajian-kajian tersebut saya sudah baca ada kartelisasi. Nah tapi kalau ini memang dilepas ke pasar ini ya swasta juga akan, akan ini juga jadi berat juga melawan ini, melawan ini melawan BUMN, kecuali asing yang, yang sangat baik dalam melakukan pembangunan-pembangunan pabrik yang *super* murah dan *super* canggih.

Saya mempunyai usul ya, untuk usulan sementara ya, usul sementara bagaimana Pak Kementerian Perindustrian mengirim tata niaganya, Pak, mendesak kepada Menteri Investasi untuk dilakukan moratorium, kalau tidak ini akan kebablasan juga kita memberikan izin-izin ini terus menerus ya. Ini sangat luar biasa akan merugikan dan mematikan pabrik-pabrik semen yang lama. Saya pikir BUMN saja pun ga bisa melawan Conch, betul ya Pak Wid? Harga? Ya Conch lebih rendah kan nah, Conch-nya sangat luar biasa juga ya. Saya pernah membaca di media ketika melakukan pembangunan disidak oleh bupatinya Bupati Bolaang Mongondow 2 hari kemudian bupatinya jadi tersangka. Nah ini kan luar biasa, ketika pabrik buatan Cina ini dibangun tanpa ada limbahnya belum selesai, izin bangunannya tidak ada, disegel pabrik Conch ini oleh bupati. Nah 3 hari kemudian bupati jadi tersangka di Polda. Nah ini kan yang luar biasa salahnya di mana, betul Pak Wid? Itu kan mantan bupatinya dulu mantan anggota Komisi V, dulu di PAN sekarang di Demokrat, di Nasdem kalo ga salah ya. Iya benar itu teman saya.

Nah, ini kan Pak Wid, Bapak sebagai ketua asosiasi melihat jernih persoalan tentang negara kita ini ya. Yang pertama bagaimana mendesak pemerintah untuk menuntut di segera, disegerakan untuk moratorium pabrik baru. Yang kedua, diatur kapasitas produksinya, Pak sehingga jangan nanti lagi harga ancur-ancuran di bawah. Kalaupun nanti ada solusi DMO ya, harus berorientasi ekspor, jangan lagi dilimpahkan dicurahkan seluruhnya produksi ke dalam negeri. Harga murah tidak bisa menutupi harga pokok produksi, ini akan menjadi persoalan ya, akan tutupnya pabrik-pabrik semen di Indonesia ini. Nah tata niaga ini tentunya pemerintah yang mengatur antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan didampingi oleh asosiasi dan juga dari Kementerian ESDM, itu pemikiran saya, Pimpinan.

Yang selanjutnya, ya saya pikir kami memahami kesulitan-kesulitan daripada pabrik semen yang ada di Indonesia ini. Salahnya itu saya pikir selalu tadi jor-joran memberikan izin perizinan kepada industri semen, dan saya pikir DPR telah berteriak dari tahun 2013,'14,'15 ya untuk dilakukan moratorium Pak, Pak Khayam ya kepada Kementerian Perindustrian pada waktu itu di Komisi VI dan saya ikut di situ dan hari ini. Hari ini Pak Widodo menjerit, datuk kita yang dari Sumatera Barat tapi orang Jawa Timur.

Saya pikir itu saja ya pemikiran saya, saya pikir *Insha* Allah mudah-mudahan Komisi VII bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pabrik semen ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya, terima kasih Pak Nasril dari PAN.

Dari PPP ada? Oh tadi Demokrat belum ya, silakan Pak Sartono silakan.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Konsolidasi dulu, Ketua. Lanjut dulu. Baru, baru datang. Makasih, Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Nasir tadi belum? Belum? Lanjut dulu *oke*. Nah, ini sedikit katanya Pak Bambang Patijaya menambahkan sedikit dari Golkar.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera semua.

Yang saya hormati Pak Dirjen Minerba, kemudian juga Pak Dirjen IKFT, kemudian juga Bapak yang dari Ketua Asosiasi Semen Indonesia, beserta Bapak/Ibu sekalian.

Saya ingin menambahkan sedikit aja, terutama tadi saya tertarik dengan istilah yang disampaikan oleh Pak Nasril tentang ugal-ugalan tadi. Saya memang agak setuju juga, karena saya dulu pernah di Komisi VI kemudian sekarang di Komisi VII. Ketika dulu waktu di Komisi VI isunya bahwa pada tahun-tahun yang lalu itu bahwa impor semen itu dibuka, sehingga memberatkan dan menyusahkan industri semen dalam negeri kita. Lalu sekarang masalahnya adalah ternyata perizinan masih tetap dibuka dan itu belum diberikan kepastian seperti judul sinetron yang lagi ngetop sekarang layangan putus bahwa perizinannya ga jelas itu. Itu kata Pak Nasril. Saya hanya menterjemahkan dengan bahasa saya saja.

Oke, tadi saya mendengar datanya mudah-mudahan tidak salah kalau salah dikoreksi saja. Bahwa sekarang ini industri semen kita kapasitas produksi atau utilitas sekitar 53% Pak ya, interaktif izin kurang. 53% untuk dalam negeri. Ya, *oke*, anggaplah sekarang 53% itu Pak ya *oke*.

Nah, kemudian situasinya kan begitu. Salah satu keluhan Bapak ke Komisi VII ini kan kira-kira berkeluh-kesah curhatlah mengenai persoalan DMO batu bara untuk kebutuhan semen kan seperti itu. Dari data ini yang saya lihat, saya datangnya terlambat sih tadi ya. Bahwa berbeda dengan spek dari PLN. PLN ini kami pusing juga ini belum *clear-clear* juga, Pak. Kalau PLN ini sekitar 4 ribuan kalori harga 70 dolar DMO-nya, patokannya, kalau bapak ini 90 dolar untuk 6.300 kalori seperti itu. Ya sebenarnya sih saya pikir sah-sah saja jika kemudian kawan-kawan dari Indocement berkeluh kesah kepada kami, karena kami juga punya kewajiban bagaimana untuk mendukung dan mendorong apa namanya proses produksi daripada Semen Indonesia sendiri.

Cuman kira-kira kan seperti ini, Pak. Kita harus mencari formula dan ini saya pikir memang tepatlah jika kita memang nanti satu paket pembahasannya dengan Pak Dirjen Minerba, karena kemarin kita di PLN pun kita berpikir tentang bagaimana mekanisme ini, karena kan harus adil, Pak. Di satu sisi kawan-kawan penambang batu bara mereka keberatan sebetulnya karena kenapa, Bapak 90 dolar untuk kalori 6.300, kalau di luar negeri itu Pak jual ekspor sekitar 150 (..suara tidak jelas..) apa ya Pak Dirjen, seperti itu Pak Dirjen. Nah ini kan *gap*-nya kan sangat jauh, Pak.

Nah, kita kan harus cari satu formula bagaimana kawan-kawan batu bara produksinya tetap jalan. Mereka tidak terlalu terbebani. Bapak juga dapat mendapatkan pasokan untuk produksi semen tersebut. Jadi, saya pikir memang solusinya mirip-mirip seperti yang kemarin kita bicarakan, kita harus cari formula apa pun itu namanya BLU-kah atau konsep gotong-royongkah itu loh, sehingga kemudian semua ini *happy*. Kalau saya dari awal sudah bicara bagaimana biar semua *happy* Pak, jangan *happy*-nya sepihak aja. Kan kalau kita berbicara persoalan listrik yang *happy* hanya PLN saja, kawan-kawan yang lain agak, agak, agak kesal juga kan seperti itu.

Nah, kemudian, ketika kami mendukung dan mencarikan solusi untuk pemenuhan kebutuhan 90 dolar untuk 6.300 kalori DMO untuk bagi industri semen. Lalu kira-kira kami juga perlu kepastian dan apa semacam, semacam apa ya janjilah dari kawan-kawan industri semen. Lalu *feedback* untuk industri atau apa namanya dunia usahakah atau apakah untuk Indonesianya apa, Pak? Ketika harga Bapak, harga batu baranya dipatok di 90 dolar, ini kan Bapak punya apa *cost*-nya lebih, lebih stabil Pak, seperti itu. Jadi, kami juga perlu satu penjelasan bahwa ke depan ketika utilitas Bapak meningkat produksi meningkat, Bapak juga ada jaminan nanti harga jual kepada masyarakat juga akan menjadi lebih rendah Pak karena akan lebih efisien. Sehingga, dengan demikian semua mendapatkan manfaat Pak kan begitu. Jadi, istilah saya itu *everybody happy*, Bapak dapat subsidi, kawan-kawan batu bara juga dapat tertolong. Dia apa tetap dapat menjual baik itu dalam negeri dan luar negeri, tapi mereka tidak terlalu berat. Kemudian, masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia juga terbantu dengan kondisi seperti ini.

Cuma saya belum tau, Pak Dirjen izin ini 90 dolar untuk semua pabrik semen atau hanya untuk dalam negeri saja atau termasuk ekspor atau termasuk PMA juga seperti itu. Semuanya?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Semua pabrik semen di dalam negeri, Pak.

F-P. GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Nah, ini kan jika ini pun dilakukan, sebetulnya memberikan keuntungan. Jika kita ekspor pun ini lebih efisien harga kita. Nah, ini saja Pak yang ingin

kami, kami dapati dari, dari kawan-kawan industri semen, kira-kira ketika ini kita dukung, manfaat untuk semuanya apa kan seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya, terima kasih Pak Bambang.

Ada lagi di *floor*?

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Sartono, Pimpinan. Pimpinan, Sartono.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Sartono, silakan. Nanti setelah ini baru ke teman-teman yang ada di dunia maya.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Para sahabat Komisi VII,
Pak Dirjen.

Mohon maaf terlambat ini karena tadi ada apa kegiatan Badan MKD, jadi saya apa untuk hadir di sini. Apa, Pak Dirjen Minerba ya, ini kan apa mungkin tadi temen-temen juga sudah kemarin membahas tentang kelangkaan kita ya dan akhirnya di izin, di-*stop* gitu ya ekspor dan sekarang sudah dibuka kembali ya, Pak Dirjen? Izin Pimpinan interaktif sama beliau dan apa yang diizinkan terbatas juga ya, Pak Dirjen ya. Terbatas dan apa ini kan kira-kira begitu supaya hal ini tidak akan terjadi lagi ke depan. Kira-kira sudah ada kebijakan-kebijakan apa yang untuk mengantisipasi tentang apa kejadian di awal tahun itu, tentang apa kelangkaan atau khususnya untuk kebutuhan batu bara untuk PLN ya. Ini saya pikir kan sudah diadakan suatu evaluasilah begitu untuk menghadapi atau mengantisipasi tersebut.

Satu sisi dengan di-*stop*-nya kebijakan itu dan sebagian sudah dibuka yang, tentunya yang sudah apa mencapai ya aturan-aturan atau apa itu, apa istilahnya, Pak Dirjen?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Ada surat pernyataan komitmen untuk memenuhi kewajiban, Pak.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Kewajiban ya, mekanismenya bagaimana itu Pak Dirjen supaya tidak terjadi lolos dan terjadi seperti ini, seperti kemarin itu. Apakah disuruh membayar dulu ataukah apa karena terus apa itu apa. Apakah langsung nanti setelah diekspor ini juga menjadi suatu hal saya pikir perlu menjadi catatan juga. Terus evaluasi kan gimana supaya apa itu berjalan dengan apa dengan teratur begitu dan berlanjutan begitu kurang lebih begitu, Pak Dirjen.

Itu, itu apa selanjutnya ya. Kita dalam situasi perekonomian kita secara nasional kan berat nih. Satu sisi apa batu bara, kalau batu bara di-stop ini otomatis menurunkan tingkat pendapatan negara, begitu PNBK kitalah dari sektor tambang ini. Saya pikir banyak tambang ya, tapi saya pikir yang dilarang kemarin batu bara saja ya, Pak Dirjen ya. Nah, ini juga ada kebijakan apa lagi kira-kira untuk ke depannya begitu. Itu kurang lebih, Pimpinan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Siap. Terima kasih, Pak Sartono dari Demokrat.

Kita sekarang masuk ke teman-teman yang di *virtual*. Tadi Ibu Diah kalau tidak salah tadi. Silakan, Ibu Diah. Dari PKS.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Ya, terima kasih Pimpinan. Suara saya yang terdengar jelaskah?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terdengar, tapi kalau boleh agak keras dikit Bu.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Oh iya, ini kayaknya udah maksimal tapi dekatkan lagi *Insy* Allah.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan komisi dan sahabat-sahabat Komisi VII yang saya hormati, Pak Dirjen juga para tamu dari Asosiasi Semen dan seluruh jajarannya.

Yang pertama saya ingin, secara umum hampir sama dengan teman-teman ya. Jadi, saya menyoroti tentang DMO masalah batu bara ini ya untuk semen. Bagaimana intinya bukan adanya aturan tetapi bagaimana aturan ini

ditegakkan ya kontranya dan apakah ada ..(*suara tidak jelas*).. terhadap mereka yang ya saya yakin kalau aturan suka ada ..(*suara tidak jelas*).. kalau orang apa mereka yang tidak memenuhi DMO ini. Tetapi apakah..(*suara tidak jelas*).. kemudian ditegakkan gitu ya untuk apa persoalan DMO.

Yang kedua ini ada kaitannya dengan tadi *oversupply* yaitu tentang izin ya, izin pembangunan dari perusahaan-perusahaan semen yang baru. Saya kira kita sepakat ya tentang masalah moratorium itu kita perlu perhatikan kembali karena dengan *oversupply* ini mungkin juga apa supaya tidak terjadi tumpang tindih ya kewilayahan dalam aspek *supply* semen. Dan terlebih lagi ternyata yang menjadi persoalan ini adalah ketika pembangunan pabrik semen baru ini juga mengancam lingkungan hidup. Urusan lingkungan hidup ini bukan sekedar apa namanya emisi karbon, tetapi juga misalkan pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur ya. Jadi, dari data wali yang saya dapatkan itu dibangun di daerah ..(*suara tidak jelas*).. dilindungi gitu.

Di sini juga, bahkan kita apa namanya di sana mengancam juga ekosistem lingkungan ya. Jadi, tentang penambangan ini di dalam urusan tambang-tambang yang lain saya sangat menyoroti bagaimana kita agar tidak hanya sekedar mengeruk keuntungan dari sumber-sumber tambang ya ada, tetapi juga bagaimana kita memperhatikan ekosistem. Karena kita, untuk apa kita nambang, untuk apa kita jual semen gitu ya untuk mendapatkan keuntungan, keuntungannya untuk apa, keuntungannya untuk kehidupan masyarakat. Lah kalau keuntungannya untuk kehidupan masyarakat luas, secara ekosistemnya juga dirusak yang rugi adalah masyarakat luas itu sendiri, terlebih lagi masyarakat yang berada di sekitar tambang ya.

Dan kalau kalau Kalimantan, Kalimantan ini kan bukan hanya hutannya Indonesia ya, Kalimantan ini adalah jantungnya dunia untuk terkait dengan lingkungan hidup daerah apa hutan tropisnya. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa persoalan lingkungan hidup ini juga diperhatikan betul oleh pengusaha-pengusaha semen ya, terlebih lagi tadi yang membangun pabrik semen di Kalimantan Timur.

Kemudian yang terakhir Pimpinan, poinnya adalah dalam rangka memanfaatkan *oversupply* terhadap semen ini. Saya kurang tau posisinya nanti ini di mana, tetapi apakah dimungkinkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan kontraktor yang mendapatkannya..(*suara tidak jelas*)..pekerjaan-pekerjaan di luar negeri gitu. Jadi, kontraktor-kontraktor pribumi kita dapat pekerjaannya di luar negeri. Nah, misalnya, *supply*-nya bawa dari Indonesia gitu. Karena kan kontraktor luar juga kalau kerja di Indonesia seringkali membawa bahan bakunya dari negaranya gitu ya, bagian dari pekerjaannya. Nah, ini juga jika memang ternyata secara *cost* dan lain-lain itu memungkinkan, bukan satu hal yang tidak mungkin ekspornya itu bukan semata-mata ekspor dari semen itu sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor kita, sehingga *oversupply* dari semen ini bisa termanfaatkan dengan baik.

Itu saja dari saya.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Bu Diah.

Ada lagi dari teman-teman yang di *virtual*?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Siap, Willy Yoseph.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Siapa?

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Willy Yoseph.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Silahkan Pak Willy Yoseph. Agak keras dikit suaranya Pak Willy ya, soalnya dari tadi ini yang dunia maya suaranya kecil di sini *volume* udah tinggi, mohon terima kasih.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Sama ini udah *full* juga. Baik.

Terima kasih.

Pak Ketua atau Pimpinan Komisi VII yang tadinya hormati dan kami banggakan, dan juga
Semua anggota yang hadir,
Yang kami hormati Pak Dirjen Minerba, dan
Ketua Asosiasi Semen Indonesia, beserta
Seluruh rekanan kita yang hadir pada sore ini.

Ya saya sangat singkat saja ya. Pertama itu *oversupply* semen. *Oversupply* semen ini ya tentu kita harus segera mengambil langkah tata niaga yang terbaru seperti itulah yang diharapkan. Kemudian saya tidak melihat

angka impor kita ya, angka impor yang dari luar apakah masih ada gitu ya atau diam-diam ada. Jadi, ini juga akan mengganggu.

Ya, memang kalau kita lihat *oversupply* ini memang pembangunan kita di Covid ini memang terganggu gitu. Jadi, penggunaan semen juga pasti juga ada sedikit masalah gitu. Tetapi saya mengajurkan ya kepada Pimpinan dan kita semua di dalam satu kesimpulan itu ya untuk segera mengambil langkah-langkah untuk kita mempersiapkan bagaimana supaya tidak *oversupply* ini. Artinya proyek kita diperbanyak atau dipercepat dan kemudian coba keran impor itu apakah masih ada atau tidak. Saya enggak melihat data. Nah, kemudian aturan-aturan main yang lain dan mempermudah dan tidak lagi membangun ya industri baru yang sama gitu, sejauh karena kalau kita melihat dengan kondisi yang seperti ini. Itu pertama.

Kemudian tentu ke Bapak Dirjen Minerba, luar biasa saya melihat beliau sudah menyiapkan data-data yang cukup ya dari rencana kebutuhan di halaman 7. Saya melihat itu sudah cukup jelas bahwa kalau kita melihat kenaikan *supplier* atau kebutuhan kita kita tidak terlalu meningkat dari tahun ke tahun, dari 2024 sampai ke 2025. Artinya bahwa kita mampu gitu loh meningkatkan walaupun tidak signifikan. Apalagi, dengan kondisi saat ini kita sudah ada sedikit membatasi ekspor ya untuk batu bara diutamakan untuk dalam negeri. Menurut hemat kami ini sudah langkah-langkah yang terbaik ya, walaupun ya kita melihat masih kemarin ada dilarang ekspor tapi juga ada yang ekspor, jadi untuk kadar kalori tertentu.

Nah, maka untuk itu, pada kesempatan ini ya saya akan menganjurkan di dalam satu kesimpulan itu ya segera artinya kita mengambil keputusan agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan baru yang membantu kita dalam industri semen dan *supply* batu bara untuk semen ini.

Mungkin itu dari saya.

Terima kasih, Pimpinan. Saya kembalikan.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Walaikumsalam.

Pak Willy Midel Yoseph dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya pikir siapa lagi dari dunia maya, dari *virtual* siapa lagi mungkin yang bertanya? Oh udah ga ada ya. Cukup ya? Saya boleh nanya ga nih, Pak? Oh boleh ya? Saya bukan bertanya, tapi kelihatannya saya akan mencoba menyimpulkan dengan apa yang dipermasalahkan oleh teman-teman tadi hari ini.

Saya melihat tentang *oversupply* ini yang paling, yang paling utama. Tapi ada satu tuntutan lagi masalah harga batu bara tadi gitu kan. Nah, ini juga realisasi dari harga batu bara ini juga harus DMO untuk semen dan pupuk. Ini juga harus terlaksana dengan baik, semua ikut *treatment* semua mendapatkan fasilitasnya. Tapi, kalau tidak mencapai seperti yang disampaikan Mbak Ratna tadi, utamakan yang lokal. Nah, itu kita lebih menjunjung tinggi investor-investor atau yang memang mereka yang lokal untuk lebih dahulu mendapatkan fasilitas dari DMO ini, tapi sejujurnya semua industri semen, semen dan pupuk ini juga harus samalah gitu. Ini cuman alternatif saja.

Kemudian kalau lihat dari tadi kita *oversupply* dan tidak bisa kalau harga batu bara tadi akan naik atau DMO-nya juga naik, keberatan untuk kita tidak bisa bersaing di dalam dunia mengeksport tadi kan ya, nah ini kan tadi satu yang saya tanya tadi, ada ga kita impor semen hari ini secara legal impor semen? Izin, Pak IKFT.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Jadi, semenjak 2018 kita tidak ada impor, Pak. Ya jadi karena situasi yang *oversupply* itu 2018 kita sama sekali tidak ada impor.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke, oke jadi impor sama sekali tidak ada ya. Jadi, sekarang kita berusaha untuk ekspor ya Pak ya. *Oke*. Nah, saya pikir ini untuk Dirjen IKFT, saran coba dilakukan bagaimana cara tata niaga ini tadi tentang apa yang disampaikan oleh asosiasi dengan dibangunnya apa tadi mil dan segala macam yang ada di lokasi dari pabrik-pabrik pengantongan dari semen-semen dari luar Kalimantan misalnya, yang akhirnya persaingan jadi berat di sana, *supply*-nya di sana tinggi dan *demand*-nya tidak, tidak sampai gitu kan. Kalau ga salah tadi *supply* sampai 9 juta *demand* cuman 4 juta Pak ya kalau nggak salah tadi Pak ya, betul ya? Nah ini kan ber, apa, kapasitas dengan *demand*-nya juga agak berat. Kalau memang betul itu diekspor, diekspor ke mana.

Jadi pengaturan ini memang betul-betul tata niaganya harus diatur, saya mohon sekali ini bisa diatur dan juga masalah izin. Izin dari pabrik semen ini sendiri kita berhenti dulu deh bangun pabrik semen. Ini temen-temen asosiasi sudah mulai teriak, kalau kita buka terus, bukan malah persaingan di dalam, tadi seperti yang disampaikan pembangunan pabrik semen tadi di Indonesia harganya lebih mahal dari pembangunan pabrik kalau tidak salah di Thailand tadi itu, itu kan sendiri juga susah kita bersaing dengan bangsa lain, dengan negara.

Jadi tolong juga kalau izin selama semen ini masih kondisi seperti ini, kita kewalahan untuk menjual, kapasitas kita sudah tinggi, kenapa harus dibuka lagi pabrik semen yang baru. Jadi, kalau boleh itu tolong ditahan itu, Pak Dirjen. Itu musti masukan dari saya.

Selanjutnya, silakan dari Bapak-bapak tadi dari beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk dijawab atau dirangkum. Ini kalau sampe lari begini nggak kuat berarti. Paham saya Pak, sama saya juga pasti lari Pak biarpun saya lagi mimpin saya minta *break* mau keluar dulu saya pasti itu. Nah izin nanti dari Pak Dirjen, Pak Dirjen IKFT, Pak Dirjen Minerba untuk menjawab ini apa pertanyaan dari teman-teman, kalau memang bisa dijawab sekarang dan kalau nanti bisa dijawab juga dengan secara tertulis. Mohon diawali dengan Pak Dirjen IKFT mungkin.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Terima kasih Pimpinan, para anggota.

Jadi, saya coba untuk menjawab satu per satu ya.

Pertama dari Ibu Dyah Roro Esti. Jadi, memang terjadi *oversupply* sejak 2014. Nah, memang ini basisnya, jadi dulu itu bahwa kebutuhan. Jadi *supply* itu, itu mungkin terlalu optimis saat itu, Pak. Ya mungkin, nanti bisa juga disampaikan juga oleh asosiasi. Jadi, dengan pertumbuhan waktu itu tinggi ya, karena di 2014 sebenarnya *quote unquote* itu ada, ada, ada juga apa namanya artinya terjadi penurunan Pak sebenarnya, karena harga minyak waktu itu jatuh itu, saat itu.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA
KOMISI VII DPRRI):**

Maksudnya penurunan apa, penurunan daya beli?

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Iya daya beli itu jadi ini nggak disangka waktu itu sudah, sudah disusun pembangunan industry itu seperti itu. Jadi karena terlalu optimis, padahal terus agar *slow down* gitu ya terus juga ada perang dagang dan sebagainya. Ini nggak disangka bahwa ini, ini menurunkan daya beli sehingga ini nggak, nggak terserap. Ini yang, yang nanti mungkin juga bisa di apa oleh asosiasi.

Kemudian mengenai emisi dari Ibu Dyah, jadi penggunaan EBT. Jadi EBT ini memang ada beberapa apa yang sudah dilakukan ya itu menggunakan selama ini ya, jadi menggunakan ban gitu ya, ban-ban bekas itu terus apa di ini kemudian tapi yang juga apa menarik itu adalah RDF. Jadi RDF itu sebenarnya sampah yang dimanfaatkan, dan itu sudah oleh PT Solusi apa di Cilacap itu sudah itu teknologinya Denmark waktu itu. Ya, jadi itu bisa menghemat batu bara 20% ya. Jadi, ini kita ingin pabrik batu bara yang di apa lokasi lain ini untuk memanfaatkan ini. Jadi, jadi nantinya akan menurunkan konsumsi batu bara harapannya ya ke depan sekitar 20%.

Kemudian apa kita, apa namanya, jadi kita berharap memang harga yang apa artinya yang kompetitif sebenarnya. Jadi apa, karena memang ini juga berhubungan ya harga semen yang kompetitif tadi juga Bu Ratna. Jadi atau juga Pak Subarna sebenarnya, artinya stabilitas harga dan pasokan semen. Jadi, apakah semen ini naik dan sebagainya. Jadi, memang kita menghendaki, karena apa yang langsung apa artinya terlibat juga di dalam proyek-proyek infrastrukturnya adalah pemerintah sendiri. Jadi, justru pemerintah ingin apa harga semen ini, ini terkendali. Jadi, justru kalau tidak terkendali ini yang, yang kita khawatirkan. Makanya faktor-faktor produksi dan juga apa termasuk juga apa bahan bakar ini bisa diatur. Nah, ini yang, yang kita ini. Tapi kita juga kebetulan menghadapi masalah-masalah *oversupply* nih.

Nah kemudian, Pak Subarna tadi juga ini bagaimana justru kita, apa kemudian Pak Rico mengenai pembangunan di Kalimantan ditunda. Betul, jadi kita sudah men, apa berkirim surat. Jadi sebenarnya dari tahun 2020 ada beberapa surat yang disampaikan oleh menteri ke Menteri Investasi BKPM. Jadi, untuk dilakukan penundaan. Jadi, investasi baru itu hanya untuk di Papua dan Papua Barat saja itu ya. Jadi, itu yang kita, kita apa, memang apa peraturannya belum menyeluruh seperti peraturan keputusan presiden, peraturan presiden seperti itu. Jadi, masih himbauan dari kementerian kita ke kementerian apa namanya BKPM ya sekarang namanya Kementerian Investasi.

Kemudian, juga ada surat menko ya surat menko itu cakupannya agar diperluas lagi bukan hanya Papua dan Papua Barat yang kebetulan apa tidak *oversupply* ya itu juga meliputi juga Maluku dan Maluku Utara. Nah, ini kasus-kasus apa namanya *oversupply* ini, memang dipertanyakan seperti apa apa strategi pemerintah. Jadi ketika, jadi ada dua pabrik sekarang yang kita untuk supaya tidak diberi izin oleh pemerintah, jadi satu di Kalimantan satu lagi di NTT.

Kemudian, ketika misalnya pabrik itu apa saat waktu artinya kita koordinasi dengan BKPM Kementerian Investasi itu misalnya sudah apa istilahnya sudah diberikan izin. Kalaupun misalnya sudah apa lanjut *project*-nya dan berdiri, itu kita minta artinya seluruh produksinya itu diekspor. Jadi, jadi itu strategi yang coba apa alternatif *oversupply* tadi itu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan.

Terima kasih, Pak Dirjen IKFT.

Mohon maaf saya menyela ya takutnya keburu lupa. Jadi sebenarnya Pak, dalam yang memberikan izin siapa ya? BK? BKPM, atas sepersetujuan kementerian-kementerian yang terkait atau bagaimana. Pakai *mic* Pak, izin Pak.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Jadi, kita sudah bersurat dengan Kementerian Investasi BKPM untuk hanya di apa diprioritaskan hanya Papua dan Papua Barat ya. Terus menteri Menko Perekonomian memperluas menjadi termasuk Maluku dan Maluku Utara saja karena daerah-daerah itu semuanya tidak *oversupply*.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Oh, baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Kemudian untuk Ibu Ratna selanjutnya mengenai survei ke, jadi survey ke PT Rayon itu Bu, jadi memang terkait dengan industri tekstil, Bu. Jadi, yang ada di Sukoharjo ini coba nanti akan kita selesaikan, Bu. Memang ada di situ gas berbahaya yang, yang dihasilkan memang sangat bau sekali dan mungkin terlalu dekat dengan penduduk gitu ya. Nah, ini coba nanti kita, kita apa lakukan inspeksi dan, dan bagaimana kerja sama dengan Kementerian LH dan sebagainya, dan juga Pemda tentunya.

Kemudian dari Pak Nasril, jadi mengenai *cost* pendirian pabrik gitu ya ini apa namanya ya seharusnya sebenarnya di negara lain dan negara kita seharusnya sama, itu sepanjang kalau dia, dia mengikuti aturan-aturan yang ini. Nah saya juga apa.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin, Pak.

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Iya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin maksudnya sama harga pokok produksi?

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Bukan, maksudnya seharusnya biaya teknologi yang, yang, yang apa artinya teknologi kita misalnya membeli pabrik semen gitu ya yang tersedia di, di luar negeri itu di negara manapun misalnya kita ini harusnya sama gitu, Pak. Jadi maksudnya apa, namun di dalam penerapannya ya karena ini ada, ada kebijakan daerah dan sebagainya. Nah, yang Bapak sebut dengan *cost* lebih

besar dari itu, itu yang artinya seharusnya apa biaya untuk barang modal itu sama sebenarnya, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tidak, Pak.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Enggak maksudnya seharusnya sama.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tidak Pak, tanya aja Pak Widodo. Harga pendirian pabrik Semen Indonesia lebih tinggi daripada di luar negeri. Jadi, sehingga kita kalah bersaing dengan Thailand, makanya kemampuan kita karena tidak mampulah lagi melakukan ekspor yang lebih besar nggak mungkin dong Pak, 47 juta itu kan gede ya, Pak kan gitu. Nah hari ini juga Thailand juga terus ekspor besar, kita nggak mampu bersaing dengan harga. Makanya kan Bapak minta turunkan harga batu bara. Nah ini persoalan yang mendasar ketika investasi di Indonesia itu besar, kecuali teknologi itu memang mereka yang mengatur semuanya, khususnya di BUMN. Karena BUMN ini kan yang lit-nya kan BUMN hari ini 51 juta dari 116 juta tadi, gimana Pak?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Jadi gini ya, investasi sebenarnya murah dan tidaknya itu sumbernya dari mana. Kalau inves tarif Pak, barang-barang dari Jerman itu bisa 30% lebih mahal. Sekarang banyak teman-teman yang investasi dari produk Cina, Pak. Merah Putih itu hampir 8% dari Cina, kualitasnya bagus, nah itu.

Jadi, sebenarnya *historical*-nya memang sejak 5 tahun lalu Pak, Cina luar biasa, Cina terlanjur investasi Jerman itu memang mahal gitu ya, makanya teman-teman yang baru-baru ini seperti konsumen itu murah Pak, karena dari Cina semua dan satu hal Pak, Cina dari konsumen adalah BUMN, dia tidak ada bunga dan segala karena dia punya uang banyak, Pak. Tapi kalau Bosowa Pak, kan mungkin 30 20% bunga dari pinjaman bank Pak, Merah Putih juga itu mungkin dari segi investasi pengembalian segala itu memang kalah gitu loh Pak, tapi dari segi kualitas dan *cost production* itu saya kira tidak kalah ya.

Jadi, sebenarnya kita tidak kalah Pak, dengan Thailand dan Vietnam, tapi mereka sudah duluan Pak. Kita baru bergerak ekspor itu tahun 2017 karena sudah *oversupply*, tahun 2015 masih impor Pak, 16 sudah mulai. Jadi, semua dikuasai oleh, oleh Thailand dan Jepang dan Vietnam, tapi *alhamdulillah* dari suatu efisiensi dari Merah Putih, Semen Indonesia, dia bisa bersaing Pak dari kapasitas ekspor. Itu kira-kira. Vietnam itu sempat ekspor 30 juta Pak ya, Thailand itu ekspor kira-kira 12, 15 juta sekarang sudah kita ambil kira-kira 15%. Maksud saya, ini teman-teman meningkatkan Pak ya, menjadi dari 11% menjadi katakanlah 16% sehingga utilisasi bisa turun gitu, tapi dengan

bayangan Pak dengan kondisi batu bara 1,2 juta mana bisa ekspor, Pak. Jadi, kenaikan daripada ekspor daripada harga batu bara internasional tidak sesuai dengan kenaikan batu bara dalam negeri gitu, Pak. Jadi, kenaikan mungkin ekspor itu naik Pak memang, tapi hanya mungkin 5%-4%, tapi produksi kita itu naik karena batu bara itu hampir sekitar hampir 20-25% nggak nutup itu, Pak.

Nah, makanya dengan DMO tadi ya mungkin masih bisa walaupun untungnya akan turun gitu loh, Pak. Makanya saya jamin kalau di DMO tidak berlangsung di dalam, di dalam negeri, kami pesimis Pak bisa ekspor dan ini akibatnya tadi yang tadi yang disampaikan utilisasi kita makin amburadul Pak, bayangkan dari ekspornya dikurang, produksi 78, dikurangi ekspor yang biasanya 12 juta jadi tinggal 60 berapa Pak, 63, 64, 65, kira-kira ya, tapi 116 berapa kelebihanannya 45 juta itu sama dengan dibagi 2,5 juta per 1 pabrik Pak, kelebihan 16 pabrik Pak, bayangkan itu.

Jadi inilah. Jadi, saya sampaikan juga tadi Bapak, saya setuju tahun 13 ingat ada yang mengusulkan moratorium ya. Saya sejak tahun 2016 Pak, Pak Ketua sudah mengusulkan mengenai harga bahaya *oversupply*, karena temen-temen yang membangun tahun 2013 semua beroperasi pada tahun 2016-2017 *big*-nya itu, semua beroperasi tapi harapan perhitungan bahwa 1 tahun kenaikannya 8 sampai 10%, nol, hanya 3% naiknya jadi tidak seimbang. Nah, itu yang saya usulkan waktu itu tahun 16, 17 terus saya usulkan kepada Menteri BKPM dan tembusnya baru awal bulan, awal tahun 20 akhir ya kalau ga salah 2020 itu. Kami menghadap ke Bapak, Pak Kepala BKPM *alhamdulillah* dijawab dengan baik “Oke Pak Widodo, kami tidak akan membangun, kecuali di Irian Jaya” dan itu Pak, dan itu didukung juga oleh dari Kementerian Perindustrian gitu, Mas.

Jadi, waktu itu sudah 106, 116 Mas, karena yang di Conch ini sudah ada izinnya ya apa boleh buat. Nah, itu yang kami kaget adalah yang tadi yang tiba-tiba ada muncul di Kaltim tadi. Waktu itu memang ada informasi, kami langsung kirim surat ke Pak BKPM dan kepada penguasa di Kaltim bahwa ada masa tanahnya gitu. Saya kirim mohon anda jadi *bridging* karena kami sudah *oversupply*, tapi ya enggak tau ini mungkin isinya sudah katanya sudah tahun 2018 ya, ya ndak tau.

Ini nanti usulan-usulan dari kami ya mengenai satu tadi adalah kalau bisa ditunda *alhamdulillah*, kalau nggak bisa ditunda minimal janjinya itu ekspor harus ekspor itu, Pak. Jangan bocor dalam negeri, kalau bocor ya Bosowa teriak, Semen Tonasa teriak, semua BUMN semua swasta multinasional gitu, Pak.

Kira-kira gitu, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ini saya potong dulu sebentar. Karena memang sekarang sesi tanya apa jawaban masih di dirjen jadi monggo Pak Dirjen menyelesaikan dulu nanti baru di bergiliran. Terima kasih. Ya, Bang Nasril oke Bang Nasril ya.

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Baik.

Jadi harga jual yang lebih kompetitif ya apa manfaatnya. Ini kan jadi justru karena kita bisa menstabilkan harga semen ya, jadi, jadi mungkin manfaatnya justru besar. Jadi, kita apa anggaran-anggaran untuk infrastruktur kita bisa lebih, lebih terpakai Pak kalau kita bisa menstabilkan harga semen itu, sebenarnya kan itu ya. Jadi kita,

Nah, cuma memang kita juga sekarang dapat tugas untuk lebih mengintensifkan soal ekspor ini. Karena bagaimana kita apa ini mungkin jangkauannya Timur Tengah belum, belum jadi sasaran kita, Pak. Nah, mungkin ke depan itu jadi sasaran kita. Jadi, itu juga permintaan juga dari ibu Diah ya kerja sama dengan kontraktor di luar negeri. Jadi, apa mungkin kontraktor-kontraktor kita yang menang di dalam *tender-tender* di luar negeri ini bisa kita, kita ini juga kita *supply* dari, dari dalam negeri.

Kemudian pabrik semen di Kaltim itu apa bisa mengancam lingkungan hidup ya, ini mungkin apa artinya dari ini kan ada izin tentunya ada izin apa namanya lingkungan hidup ya, ya jadi itu saja.

Kemudian terakhir dari Pak Ketua sendiri, ya jadi perizinan industri semen ini memang tadi sudah ini kita memang sudah apa ingin apakah ini sekedar apa namanya antar kementerian, tapi apakah bisa di, di, dinaikkan lagi jadi perpres yang nanti bisa mengatur bahwa apa artinya moratorium itu akan berlaku misalnya 8 tahun atau 10 tahun ke depan.

Itu, itu saja dari kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA
KOMISI VII DPRRI):**

Ya, terima kasih Pak Dirjen IKFT.

Mungkin lanjut Pak Dirjen Minerba bisa dijawab, terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN
DJAMALUDDIN):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang terhormat,

Yang pertama Ibu Roro Esti tadi menanyakan apakah harga 90 dolar perlu lebih rendah. Dari rapat yang dilakukan tanggal 28 Oktober 2021 pada saat itu

asosiasi semen menyatakan kalau HBA PLN yang 70 itu dinaikkan hingga 25% yang artinya 87,5 semen masih bisa menanggungnya, sebaliknya APBI yang kami undang juga asosiasi pengusaha batu bara menyatakan pada tahun 2011 ketika harga batu bara 120 dolar, industri semen masih bisa memikulnya juga. Jadi, berdasarkan masukan-masukan itu kita bersepakat untuk menentukan harga di 90, Pak. Takutnya kalau lebih dari 90 nanti semen jadi tidak kuat juga.

Nah, berdasarkan kepmen yang diputuskan berdasarkan rapat tersebut, harga 90 dolar ini tidak hanya untuk semen yang dijual di dalam negeri Pak. Pokoknya kita kasih 90 dolar kepada semen dan pupuk, dia mau jual ke mana saja bukan bagian dari kepmen tersebut, intinya mau dijual ke mana saja.

Kemudian, tadi Ibu Ratna Juwita, kami akan kalkulasi terhadap permohonan asosiasi jika dikabulkan, juga tadi akan kami pertimbangkan usulan asosiasi. Asosiasi tadi mengusulkan ya atau Pak Dirjen mengusulkan untuk diperpanjang kebijakan yang semula berlaku sampai dengan 31 Maret, kami akan diskusikan kembali dan undang para pihak yang terkait.

Pak Sartono tadi menyatakan antisipatif, kebijakan antisipatif terhadap kekurangan pasokan batu bara. Sebagaimana, pernah kami sampaikan minggu yang lalu Pak untuk memantau kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap DMO, mulai Januari ini kita akan memantau secara bulanan, Pak. Jadi, bulan ini kami akan memantau kepatuhan perusahaan-perusahaan. Sehingga, bulan depan mereka akan ditentukan apakah sudah memenuhi, mematuhi atau belum sehingga sudah boleh ekspor atau tidak.

Mengenai menurunkan pendapatan negara, kalau tidak boleh ekspor memang ini bahasa kerennya *trade off*-nya begitulah Pak, kalau memang ekspor kita lebih tinggi terima royaltinya, tapi konsekuensi kita kalau misalnya kasus ini kemarin 10 *gigawatt* mati, 10 juta pelanggan terancam kita juga tidak ingin agar kegiatan ekonomi secara makro juga terganggu, Pak.

Kemudian, Bapak/Ibu sekalian, khusus untuk yang harga batu bara semen ini, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan juga mudah-mudahan tidak memberatkan perusahaan batu bara. Karena, sesungguhnya *volume* yang dijual kepada semen dan pupuk ini tidak menambah *volume* DMO yang sudah diberikan. Jadi, tetap dalam kalkulasi DMO yang sudah di 25% itu. Bahkan kalau kita lihat dari perbandingan harganya, kalau dia jual ke PLN 70, dia jual ke semen dan pupuk masih 90. Jadi, sebetulnya tidak ada aspek yang memberatkan dari sisi perusahaan batu bara.

Kemudian Ibu Diah tadi juga mengenai penegakan aturan, saya kira ini sama, Bu. Kami akan pantau secara bulanan terhadap DMO ini.

Kemudian tadi Pak Willy Yoseph kebijakan baru untuk batu bara industri semen, kami lanjutkan diskusinya. Jadi, sebelum berakhir tanggal 31 Maret, kami akan evaluasi kepmen ini dan lihat perkembangannya. Kalau Pak Widodo dan teman-teman ASI sudah merasa aman. Kita akan pertimbangkan untuk kebijakan baru tapi kalau memang Pak Dirjen kayak mengatakan masih perlu

dilanjutkan, bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah secara bersama-sama.

Secara umum demikian saya kira termasuk juga dari pernyataan penutup Pak Ketua, Pak Dony Oekon tentang harga batu bara. Saya kira secara umum kebijakannya demikian, Pak.

F-P.GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan, sebentar, Pimpinan. Boleh interaktif sebentar?

Ini mohon maaf Pak, ini bicaranya yang gede-gede, kalau saya yang kecil-kecil tadi. Adakah sekarang kita memperjuangkan di harga 90 supaya harga stabil. Pertanyaan saya tadi asosiasi bisa menjamin harga untuk masyarakat ini tidak naik itu kan tidak dijawab. Padahal, terus terang saja inilah yang diperlukan sebenarnya masyarakat hari ini, Pak.

Mohon maaf itu yang gede-gede, saya tadi ngomong yang kecil, Pak. Hari ini, saat ini harga semen naik. Ketika sekarang harga 90, apakah dijamin harga turun kembali. Itu pertanyaan saya Pak tadi belum dijawab.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya sebelum dijawab ini kita mengingatkan tadi pimpinan yang sebelumnya menjadwalkan sampai 15.45 WIB tadi apa sidang, saya perpanjang dulu sampai 16, 16.20 WIB deh. Ya terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan, lanjut jawab.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih, Pimpinan.

Iya Pak, kalau soal harga jual mungkin Pak Dirjen atau asosiasi menjawab. Kalau saya tadi lebih memastikan harga supaya pabrik semennya tidak tutup dulu, Pak.

Demikian dari saya, Pak. Iya, Pak.

F-P.GERINDRA (H. SUBARNA, S.E., M.Si.):

Masyarakat hari ini naik Pak masalahnya, itu Pak. Jadi harus diingat, tadi 55% kalau tidak salah di Jawa, Pak. Di Jawa pengeluaran untuk semen.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Dirjen mungkin bisa menjawab yang untuk masalah ini. Pak Barna tadi menanyakan masalah harga tadi bertahan harga di 90 ya? Dengan 90 ini harga tidak akan naik atau bagaimana.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Justru Pak artinya ini kan sudah ada insentif dari pemerintah. Jadi justru kita ingin menstabilkan tadi itu karena akan pengaruh terhadap juga anggaran kita untuk infrastruktur, Pak. Itu yang, yang kita jaga Pak, makanya ya kita terima kasih ESDM sudah sama-sama ya sebagai pemerintah untuk menjaga ini, Pak. Nah, tapi ya mungkin detailnya mungkin bisa disampaikan oleh asosiasi, silakan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke, saya pikir nanti akan dijawab sama Pak Asosiasi, Kang Barna ini bagian dari asosiasi. Pak Dirjen Minerba sudah dijawab semua? Cukup ya.

Oke lanjut ke Pak Widodo dari asosiasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tadi.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Terima kasih.

Jadi, saya kira pertama *oversupply* tadi sudah dibahas panjang lebar. Kami matursuwun semua kelihatannya mendukung segera ada moratorium Pak. Temen-temen sudah menjerit selama 2 tahun tapi tidak ada, tapi *alhamdulillah* bantuan dari Bapak Menteri Perindustrian dan BKPM waktu itu sudah ditetapkan bahwa hanya bisa di Irian sama Maluku. Kami masih terus berjuang. Nah, tentunya dukungan dari Bapak-bapak, Ibu Komisi VII bisa dikeluarkan moratorium seperti Pak Nasril tadi. Kalau ndak gitu ya nanti muncul lagi Pak ini repot. Ini pertama mengenai *oversupply*.

Dan mengenai tadi masalah apa persaingan ekspor. Kami kira memang kita akui dengan kondisi harga DMO kita agak menurun persaingan, Mas. Jadi jangan ada suatu pandangan dengan DMO 90 ini kita nggak naik, dengan DMO 90 kita harga produk naik 15% Pak, kalau nggak ada DMO naik 35% biaya produksi. Jadi kalau harga batu bara, semen itu naik wajar Pak, selama 3 bulan kita menderita dengan harga 1,2 juta. Itu rata-rata itu profitnya akan turun

semua, Pak. Bayangkan Pak, itu harga kenaikan produksi 30% naik, jadi kalau inilah akibatnya kami usulkan segera ada segera ada DMO, supaya harga di pasar tidak naik terus, Pak.

Saya yakin Pak, kalau ini tidak ada DMO bisa meningkat sampai 15-20% naiknya, ga kuat Pak temen-temen itu, lah masa orang jual mau rugi, Pak. Ga mungkin lah.

Jadi, apalagi temen-temen yang baru investasi baru Pak harus bayar bunga dan lain-lain yang sangat menderita sekali. Jadi, mohon maaf Bapak Sana kalau harga naik itu wajar Pak, kondisi begini wajar kalau naik.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Subarna namanya.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Pak Sanar iya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Subarna, Pak.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Pak Subarna *alhamdulillah*. Jadi, jangan dikeluhkan asosiasi, keluhan yang jual batu bara, Pak. Kita nggak mungkin jual rugi Pak dengan kondisi produksi biaya produksi naik 30% Pak. Harganya di lokasi paling naik cuma bahkan mungkin temen-temen 8% saja naiknya, itu masih rugi, Pak. Nah, makanya dengan DMO Pak, kita harapkan kenaikannya bisa di-*stop* gitu loh Pak, ga *belanyur* kalau istilah orang Jawa. Tapi kalau mau turun Pak nggak mungkin, saya nggak sanggup, karena harga produksi langsung naik 15% dengan kondisi DMO 90, Pak. Karena DMO 90 harga batu bara 800, Pak. Awal tahun itu adalah cuma 550, naik 250 ribu bagaimana nggak naik Pak, pasti naik Pak kalau ga naik yo tinggal tunggu tutup aja gitu loh. Jadi, itu untung, Pak. Untung, terus terang saja, ini dengan *oversupply* Pak, itu aja bertahan cuma 8%.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pak Widodo.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Silakan, Pak Nasril. Pak Nasril mau interupsi, *monggo monggo*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Berapa kontribusi energi batu bara untuk harga pokok semen, berapa persen?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Sekitar 30, 35%.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

35% untuk.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Itu, itu sebelum kenaikan anu, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya dengan dengan DMO 90, 35%?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Oh dengan DMO itu turun, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Turun?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Turun menjadi sekitar 15%.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

15%.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Iya, tapi sebelumnya 30% Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kenaikan semen berapa?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Temen-temen informasi ke kita sekitar 8% aja kira-kira. Temen-temen, coba ini *fair* aja ini dari Tiga Roda Pak, silakan Pak.

ANGGOTA ASOSIASI SEMEN INDONESIA :

Mohon izin membantu, Pak.

Jadi sebelum, sebelum batu bara naik kontribusi *cost* batu bara ke COGM kita, biaya produksi itu adalah sekitar 30, 35% Pak, tapi setelah batu bara ini naik kan jadi dia porsi juga ikut naik menjadi 40an persen gitu Pak. Jadi kalau Pak Widodo bilang 30% eh 40% sementara harga batu baranya dari 550 ke 800 itu kan naik sekitar 33% Pak. Jadi, kurang lebih 15% lah ke biaya produksi.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Komponennya komponen biaya batu bara itu 15%, 40%.

ANGGOTA ASOSIASI SEMEN INDONESIA :

Dari biaya produksi.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Dari biaya produksi?

Tinggi juga ya, Pak.

ANGGOTA ASOSIASI SEMEN INDONESIA :

Tinggi Pak memang, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya jadi tadi *sorry* dengan peningkatan harga yang dari 90 ke atas itu ada penambahan dari beban itu jadi penambahan dari 30 menjadi 40% ya, kurang lebih gitu ya. Jadi peningkatan itu peningkatan harga itu dikarenakan harga batu bara?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Betul, betul Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

100% karena batu bara? Kenaikannya.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Mayoritas, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Mayoritas.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Mayoritas.

ANGGOTA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (PT INDOCEMENT):

Mohon sekalian curhat juga nih, Pak jadi.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Nah ini, silakan, silakan.

ANGGOTA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (PT INDOCEMENT):

Kebetulan selama masa pandemi ini Pak. Gimana, Pak? Oh saya dari PT Indocement, Pak. Iya. Iya dari Indocement, Pak. Iya, iya. Jadi sebelum, sebelum apa selama masa pandemi tahun 2020 itu waktu perekonomian kita *drop* itu pelayaran kita juga banyak apa ya mengirim atau men-*carter* kapal-kapalnya ke luar, Pak, kontainernya dan lain-lain, Pak. Nah ini, begitu ekonomi kita mulai pulih di tahun ini, Pak itu mulai semester kedua itu kita juga mengalami kekurangan Pak, untuk pengiriman ke Sumatera, ke Kalimantan dan lain-lain, itu kenaikan cukup signifikan bahkan sampai 20-25% Pak, karena memang ketiadaan *space* kapal, Pak. Ya, jadi itu yang mungkin jadi tambahan kesulitan bagi industri kita.

Kemudian industri semen kita ini kan masih 75% menggunakan sak, Pak, kantong dan kantong kita itu masih mayo, 100% itu ekspor Pak kertasnya Pak. Nah sekarang ekspornya ini juga semakin langka Pak jadi kayak kalau kita ekspor dari Eropa itu juga semakin sulit mendapatkannya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Maksudnya impor Pak ya, impor.

ANGGOTA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (PT INDOCEMENT):

Eh impornya, iya impornya. Itu semakin sulit mendapatkan kertasnya. Apalagi dengan adanya *online* bisnis dan lain-lainnya ini, si pabrikan kertas Eropa ini lebih suka mereka membuat *cardboard* Pak yang punya nilai tambah lebih tinggi daripada menjual untuk kertas semen biasa begitu, Pak. Begitu, Pak.

Terima kasih Pak. Itu tambahan dari kami, Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke terima kasih. Pak Widodo masih ada lagi?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Baik, masih sebenarnya. Enggak Pak, enggak, singkat singkat.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke Pak Widodo.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Jadi pertama ini *oversupply* kapasitas tadi *monggo* kalau Kaltim ditunda pelaksanaannya kami *alhamdulillah* Pak ya otomatis tidak menambah apa beban daripada temen-temen utilisasi akan turun ya.

Kemudian masalah ekspor tadi sudah kami jelaskan, apabila DMO untuk semen itu tidak lancar, ini ekspornya nggak lancar Pak itu. Artinya yang nggak dapat DMO ya nggak bisa ekspor gitu. Makanya tadi saya sampaikan, tadi kami mohon dengan sangat tidak ada perbedaan antara swasta dan dan nonswasta ya. Ini nggak bener, nggak. Kami kurang setuju karena mereka ikut kontribusi dalam pembangunan nasional, Pak.

Jadi kalau bisa, ya tadi makanya saya sampaikan apa itu DMO itu jangan 25% Pak, 35% itu baru semua dapat ya. Kalau dapat tadi disampaikan pasti harga itu semen tidak naik gitu loh Pak. Itu kan kalau tadi sampaikan kalau kami yakin DMO ini jalan tidak akan naik lagi Pak *Insha* Allah temen-temen ini, tapi kalau disuruh turun nggak bisa Pak, kalau turun ya kembali ke harga 600 ribu tadi. Ini kira-kira mengenai harga.

Kemudian, masalah yang penting tadi dari Ibu, Ibu Roro ya mengenai masalah apa, masalah emisi ya emisi ya tadi *carbontech*, *carbon* ini. Jadi kami laporkan ya bahwa kami sudah melakukan tadi suatu langkah-langkah untuk mendukung pemerintah dalam penurunan gas rumah kaca di mana tahun 2020, 2030 itu harus turun 29% ya. Kami sedang langkah, mengambil langkah-langkah di mana dengan melakukan berbagai anu berbagai inisiatif mengenai pembakaran tadi pembakaran sampah itu Pak, kemudian juga melakukan pembakaran apa sekam padi dan lainnya, bahkan sama limbah P3 kita bakar sehingga mengurangi penggunaan batu bara, Pak. Nah kalau batu baranya kurang, ya emisinya kurang gitu prinsipnya. Jadi, kami mendukung pemerintah tentunya, kami usulkan ini bukan, bukan pajak karbon adalah pasar karbon Pak, jadi jual beli karbon.

Dan Pak Nasril, kami usul untuk semen tidak mungkin, tidak mungkin nol ya, tidak mungkin Pak. Pabrik semen itu membakar batu kapur, batu kapur emisinya 1 ton batu kapur itu kira-kira keluarnya itu sekitar 0,25 ton emisi, tidak bisa diantisipasi Bapak. Makanya, kondisi emisi di pabrik semen itu 55% dari pembakaran batu kapur. Batu kapur adalah sumber daripada semen sekitar 75%. Jadi, paling terbanyak emisi di cerobong itu adalah dari pembakaran bahan bakunya batu kapur Pak. Itu sekitar 55%, 35% pembakaran batu bara, Pak. Batu bara kalau dibakar nggak mungkin nggak keluar emisi, pasti keluar emisi.

Jadi, kami sudah me apa, pemerintah juga mengeluarkan Pak mengenai peraturan itu. Jadi, NDC ya jadi itu masalah peraturan karbon itu kami sudah kira-kira dengan peraturan kami sudah memenuhi syarat. Tapi, tidak bisa kami harus dikenakan pajak karbon yang ada adalah jual beli karbon. Di mana nanti ada standar minimum Pak, standar minimum, Pak Nasril. Jadi, kita itu ada aturan pemerintah minimum yang keluar emisi di cerobong semen itu adalah sekitar 725 kilogram beton semen. Itu standarnya dari aturan pemerintah sebelumnya. Nanti kalau silahkan kalau nanti ada peraturan mengenai jual beli karbon, ya kalau nanti diturunkan 700 yang di atasnya silakan dikasih pajak atau jual. Tapi, yang di bawahnya bisa menjual, Pak Nasril. Tapi untuk pabrik semen dikenakan semuanya untuk dikalikan dari per tonnya. Itu bangkrut Pak iya bangkrut Pak. Tidak ada di dunia ini pabrik semen nol keluarnya dikasih pajak ndak ada Pak, belum ada. Jadi yang ada adalah tadi pasar karbon tadi, baik di Cina, di Thailand di mana.

Nah, itu saya kira usulan kami sudah diterima ya katakan sudah diterima ya cuma ya pokoknya yang pemerintah setuju adalah pasar karbon. Nanti akan distandarkan untuk semen berapa minimal Pak 1 ton, untuk pupuk berapa, itu kelebihannya harus membayar pajak. Nah, itu kami setuju, itu sangat bagus, karena tidak mungkin industri yang menggunakan batu bara itu bisa nol, karena baru 2 hari pasti mengeluarkan CO₂ itu ya makanya PLN kan bertahap lama-lama, tidak ada lagi PL anu, menggunakan batu bara tapi menggunakan panas bumi dan lainnya. Tapi kalau pabrik semen tidak ada gantinya Pak, paling batu kapur yang terbesar Pak, kalau dibakar tuh kira-kira 50%, 55% itu dari batu kapur yang dibakar itu Pak ndak bisa lagi dikurangi. Tapi, batu bara yang bisa mengurangi adalah penggunaan, penggunaan apa itu mengurangi bahan bakar batu bara Pak dengan mendaur sampah, membakar apa, limbah P3 dibakar itu akan mengurangi.

Tadi dijelaskan oleh teman saya yang dari apa Cilacap, Pak itu bisa mengurangi batu baranya itu ke 20% itu. Jadi dari batu bara tadi kan keluar sekitar anu Pak 35% terdiri batu bara Pak anu CO₂-nya itu, yang 50% dari batu kapur yang dibakar. Nah, ini batu kapur yang dibakar itu tidak mungkin dikurangi, tapi kita sudah bisa memenuhi persyaratan daripada itu tadi, NDC Pak. Jadi kita sudah efisiensi dengan menggunakan semen ramah lingkungan, jadi sudah batu kapurnya itu sudah standar, sudah memenuhi aturan pemerintahan NDC *national determation* itu untuk IPPU itu maksudnya pemakaian batu kapur, semen sudah memenuhi syarat Pak karena kita menggunakan, memproduksi semen ramah lingkungan. Itu kira-kira, itu mengenai, mengenai tadi emisi yang disampaikan tadi kami mendukung.

Kemudian saya kira yang lainnya adalah ekspor tadi. Ekspor kita tadi kami sangat terima kasih didukung tadi, terus terang kalau nggak ada ekspor Bapak Ketua itu kita bisa *collapse*, karena ekspor kita itu 15% Pak.

Jadi, kami sampaikan saja bahwa, bahwa pabrik semen kita itu baru klop dengan permintaan kalau kenaikan 5% itu baru tahun 2030 Pak, baru klop. Makanya kami usul itu moratorium itu kira-kira 30 dikurangi 3 tahun atau 2 tahun, kalau bangun pabrik semen kan 2 tahun, 3 tahun, sebelum sama itu kiranya sudah ada pembangunan baru. Makanya kami usulkan itu moratorium itu ada sampai tahun 2028 atau 2027 minimal gitu. Itu yang kira-kira yang sangat kami harapkan, kesempatan kami menghadap Bapak terhormat Bapak DPR, supaya moratorium itu betul-betul merupakan langkah yang efektif di dalam kestabilan atau kelangsungan dari industri semen yang sudah membangun luar biasa ini.

Dan rata-rata hanya 60% Pak utilitasnya ya. Semen Bosowa Pak itu ada 50% Pak dari kapasitasnya itu Bosowa sekitar 6 juta ton, ada yang jual 3,5 juta Pak, 4 juta bayangkan itu industri dalam negeri, milik pribumi yang demikian itu gitu loh. Kalau dibangun terus, nah ini yang kami rasakan oleh Bosowa adalah dibangun di Kalimantan, Bosowa itu pasarnya di Kalimantan, dibangun di Kalimantan, bagaimana perasaan Semen Bosowa dan Tonasa. Itu aja curhat kami.

Terima kasih Bapak Pimpinan dan anggota atas diberi kesempatan. Semoga Bapak sehat semua, sukses dalam menjalankan sehari-hari.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Iya Bu Rat.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Tadi kan titipan pesan kami untuk anggota asosiasi belum direspon oleh Pak Ketua, Pimpinan.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Gimana, gimana Bu, maaf, Bu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Yang terkait koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya yang berlokasi di.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Oh iya, maaf, maaf iya Bu. Ya, makasih, Bu.

Jadi Bu, Semen Merah, Singa Merah adalah Semen Cina terus terang saja itu baru masuk anggota ASI 2 minggu yang lalu. Jadi menurut saya, saya bilang "kalau kamu ingin perubahan dengan baik masuk anggota asosiasi" Siap Pak Widodo, nah itu. Jadi dia sudah resmi menjadi anggota.

Nah, nanti akan kami surati Pak mengenai Bapak, ya laporan Ibu/Bapak sekalian kepada mereka bahwa ada perbaiki, perbaiki hubungan antara anda dengan pemerintah daerah, karena gimana juga pemerintah daerah yang memberi anda izin untuk pembangunan ini. Begitu Bu.

Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya terima kasih, Pak Widodo. Jadi itu pesennya kenceng sekali Pak, itu Jember supaya dia berkoordinasi. Mereka cari makan di kita, kalau nggak mau ya diusir aja Pak, gitu Pak, betul ya cocok ya?

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya ini kalau dia tidak bisa berkoordinasi dengan pemerintahan daerah supaya sinergilah Pak, begitu Pak.

Izin, terima kasih. Tadi ada Pak Ketua, Pak Sugeng mau menambahkan. Silahkan, Pak Sugeng.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Pak Pimpinan, Pak Dony.

Yang terhormat juga Anggota Komisi VII yang hadir baik fisik maupun *virtual*,
Yang terhormat Pak Dirjen IKFT,
Pak Dirjen Minerba,
Ketua Asosiasi, dan juga
Bapak-bapak/Ibu sekalian.

Ini kembali kepada semen. Semen kita *oversupply* memang pasti banyak sebab ya, covid pasti, sehingga *demand* memang anjlok. Tapi ada sebab lain, kalah bersaing Pak memang kita juga kadang-kadang dengan semen Cina gitu. Cina memang sedang *oversupply* nih Pak, *volume*-nya luar biasa kurang lebih 900 juta ton mereka, itulah *oversupply*. Kenapa? Karena Cina itu praktis sudah tidak membangun infrastruktur sekarang karena seluruh infrastruktur sudah tersedia itulah celakanya gitu, sehingga tadi meleber jadi apa tadi semen yang masuk Jember dan sebagainya itu kan akibat itu sebetulnya. Nah, itu satu.

Jadi, memang diharapkan kita harus berani terus efisien. Salah satu efisiensi ini mau kita bantu, Pak. Rasanya kok tidak adil kalau semen juga tidak dikatakan sebagai industri strategis, karena DMO itu di *pack* 70 dolar per ton itu hanya untuk PLN, seneng nggak Pak misalnya untuk semen kita *pack* juga seharga kaya DMO-nya PLN?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Alhamdulillah.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Misalnya begitu, kan begitu Pak. Jadi, nolong sekali kan. Karena kita tau sekarang kan 90 dolar per ton. Jadi, nanti rumusan DMO itu adalah untuk kepentingan nasional adalah sekian, sekian proporsinya. Sekarang kan 25% dengan harga. Kemanfaatannya untuk apa sekali lagi DMO itu tidak hanya untuk PLN, menurut hemat kita begitu Pak Dirjen Minerba. Jadi, nanti lantas kalau secara *volume* memang tidak cukup. Di forum ini juga sudah kita hitung. Memang harus naik nih nampaknya DMO kenapa, di PLN sendiri konsumsinya akan naik kok dengan naiknya apa 35 ribu *megawatt* yang sekarang ada mau naik karena sudah *commissioning* kurang lebih 9 giga, 9 giga tuh selama kurang lebih 45 eh 50 juta ton lagi itu karena 1 tahun 1 giga itu membutuhkan kurang lebih 6 juta ton.

Jadi, memang DMO nampaknya akan naik, tapi lagi-lagi kan kita nanti bicara juga dengan pelaku usaha. Jadi DMO misalnya 30%, tidak 25%. Artinya kalau produksi nasional 600 juta, 30%-nya tuh kurang lebih hampir 2 apa 150 lebih pastinya Pak, 160 bahkan mungkin 170 juta ton dan itu untuk kepentingan PLN plus untuk kepentingan industri aman. Apalagi Pak Dirjen kemarin dengan skema harga yang juga kita sudah istilahnya skema gotong royong istilahnya karena BLU tidak ada konsep di minerba, di undang-undang kan tidak ada namanya skema BLU.

Nah ini, Pak. Pak siapa namanya kok saya lupa, Pak Widodo, rampung *nek ngene* Pak, *iyu toh?*

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Alhamdulillah.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Nah iya itu, jadi itu Pak. Tapi kita juga minta bagaimana seperti tadi, kalau nanti ada *support* di situ harus memperbaharui namanya *carbon capture* misalnya di semen. Kenapa? Supaya kita semuanya *inline* Pak, kebijakan. Ini kan mumpung, mumpung ini batu bara tinggi harganya silakan diekspor setinggi karena apa, di tahun 2030 udah di-*stop* nanti Pak, tidak ada satu pun yang pakai batu bara. Nah, itu satu, mumpungnya.

Tapi mumpung dalam konteks positif, ya meningkatkan *capacity* nasional kita apa industri kita. Nah jangan khawatir Pak, kita nanti akan bikin skema yang akan meringankan beban apa dari semen, tapi janji juga nanti apa yang kita ringankan itu juga untuk apa peningkatan teknologi agar tidak, agar ramah lingkungannya lebih-lebih ramah lingkungan karena kita sudah *Paris agreement*, sudah kita ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Jadi gitu Pak, inilah gunanya kita RDP dan RDPU namanya di sini. *Matur nuwun* Pak, loh kok saya yang *matur nuwun*. Ya begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Pimpinan, Pak Sugeng.

Mungkin kita saya agak rangkum sedikit. Tadi memang harga beban dari DMO tadi ini agak repot nih Pak saya dari tadi sebut nama saya sendiri ini soalnya Pak, DMO ini kan singkatan nama saya sendiri dari kemarin disebut-sebut mulu nama saya nih, Pak.

Jadi, poinnya adalah memang target kemarin kita sempet bikin bicara dengan temen-temen dari Kadin mengenai konsep yang dilancarkan, ditayangkan oleh pemerintah mengenai BLU. Kita tuh seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi tidak ada itu di minerba itu sebetulnya BLU, tapi entah apa namanya, nanti kemarin kita sudah bicara dengan temen-temen di Kadin itu dengan, sepakat dengan entitas baru, entitas baru dari sisi minerba. Kemarin kita fokus untuk PLN nih DMO PLN 25%, 25% itu total berapa Pak Dirjen?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

..(suara tidak jelas).. tahun lalu yang direncanakan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

130?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

137,5.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

137,5 DMO 25% Pak ya, ya ini karena kapasitas seperti yang disampaikan tadi akan meningkat. Nah, nanti kita lihat caranya bagaimana dengan konsep gotong-royong ini apakah nanti juga semen juga bisa masuk ke situ kita lihat. Pokoknya konsepnya nanti kita konsep gotong-royong. Menurut saya konsep itu jadi *win-win* sebetulnya, konsep *win-win* dari sisi penambang minerba dan juga pemerintah. Nah, nanti bagaimana angkanya bagaimana hitungannya ini kita coba akan godog lagi. Waktu kita tidak lama ini, kan kita udah berjalan ini tahun berjalan.

Dan saya setuju sekali dengan jawabannya Pak Ridwan, konsep masalah batu bara ini kita akan pantau terus tiap bulan mengenai proses DMO, supaya ini bicara kepatuhan dari para pemegang IUP ini mereka bertanggung jawab untuk itu. Karena bukan hanya pemerintah saja, kadang-kadang yang main para penambangnya itu sendiri gitu nggak mau memasukkan DMO, Pak.

Jadi, kita dari dua sisi dari si pengusahanya sendiri IUP-nya dari pemilik IUP juga melaksanakan DMO dan dari pertama, dari pemerintah sendiri juga betul-betul memantau tidak seperti yang lalu. Kita betul-betul setiap bulan kita pantau hasil dari DMO ini sampai seberapa jauh. Gitu mungkin Pak Ridwan ya. Mungkin boleh kita masuk langsung kesimpulan ya, teman-teman yang lain setuju ya. Sebelumnya saya perpanjang dulu waktu 10 menit ya sampai 16.40 WIB ya.

(RAPAT : SETUJU)

Boleh ditayangkan kesimpulannya.

1. Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk menjamin implementasi Kepmen ESDM Nomor 206.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di tanah air, agar semen industri, semen semua industri semen mendapatkan harga sesuai kepmen tersebut.

Setuju?

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Izin, klarifikasi sedikit saja, Pak. Harga itu tadi sudah disinggung Pak Widodo tidak hanya untuk BUMN Pak, untuk semua industri semen

menegaskan itu saja Pak. Kalau ini sudah benar Pak, tadi Pak Widodo mengatakan diharapkan untuk semua industri, ini sudah benar Pak tadi, saya menjawab itu ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Semua ..(*suara tidak jelas*).. industri semen dan, ini benar berarti ya, ya betul ya. Ketok ini Pak ya. Oke Pak Widodo ya, ya ketok ya saya ketok ya kesimpulan pertama oke ya.

(RAPAT : SETUJU)

Yang kedua sekarang,

2. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia, Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia untuk menerapkan tata niaga industri semen secara transparan guna meningkatkan utilitas industri semen dan menjaga stabilitas harga semen di tanah air.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Bukan utilitas, utilisasi Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Utilisasi. Iya iya. Wah jeli ini Pak Dirjen, utilisasi. Oke ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Sebenarnya menerapkan tata niaga ini kan tata niaganya belum ada. Nah ini di antara mitra kita ini siapa *leader*-nya, tanpa *leader* ini mereka tidak akan mampu menetapkan ataupun menerapkan tata niaga. Katakanlah Menteri ESDM mampu berkoordinasi interdep ya bersama asosiasi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, artinya kapasitas yang terpasang

116 juta ton itu mereka jangan buru-buru mau nge-*full*-kan ini utilitasnya, harus diturunkan. Kalau tidak, mereka berantem sendiri.

Nah, kalau untuk orientasi ekspor ini yang kita dukung, tapi untuk dalam negeri ya jangan nanti mereka gontok-gontokan harga. Nah itu yang perlu diatur siapa yang di antara mereka nih sebagai *leader*-nya untuk melakukan koordinasi interdep ya membuat tata niaga yang nantinya apakah Menteri Perdagangan, apakah Menteri ESDM. Nah, ini atau Menteri Perindustrian mampu ya Pak, kira-kira?

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Pak Nasril jadi, kalau selama ini mungkin kita pernah juga ini dengan pupuk ya, tapi itu juga dengan perdagangan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya artinya *leader*-nya Bapak kita tunjuk di sini.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Boleh, boleh.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya jadi harus dimasukkan sebagai, sebagai *leader* ya Pak Nasril ya kira-kira begitu ya.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Bentar, Pak ya. Asosiasi semen hanya mengurus masalah kerja sama produksi.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Bapak mengumpulkan anggota Bapak.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Kerja produksi, kerja sama masalah pengembangan, tidak boleh *cowal-cawil*/Bahasa Jawa-nya. Tidak boleh ikut campur masalah harga itu, Mas. Jadi, kalau itu ikut campur, asosiasi semen dibubarin sama KPPU itu makanya. Makanya kami bebas, kalau rapat-rapat hanya masalah efisiensi produksi,

gimana kelancaran *supply*, ekspor gimana, tapi tidak menyentuh selain masalah harga.

Nah ini Pak, jadi memang KPPU pesan begitu. Jadi, kami selama ini tidak pernah, tadi kenaikan harga itu adalah betul-betul istilahnya *free*, tapi mereka yang jual murah Pak Nasril, akan kena KPPU. Artinya dia menghancurkan industri, gitu Pak. Sudah, sudah ada kasus kemarin ya salah satu anggota kami kena 15 miliar karena menjual terlalu murah.

Jadi, terus terang kami asosiasi tidak boleh ikut campur masalah berapa mereka harga jual Pak, kami hanya me, setiap rapat tentunya menyarankan jangan sampai di daerah ada kelangkaan semen itu aja dan gimana anda memproduksi semen yang berkualitas tidak merusak, merusak itu. Kira-kira itu ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya silakan Bu Ratna, silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Konkrit, Pimpinan. Karena hari ini kita, kita RDP-nya dengan Dirjen IKFT dan Dirjen Minerba, sedangkan saya sepakat dengan Pak Widodo kalau ini masalah regulasi, harusnya asosiasi tidak dimasukkan di dalam poin ke-2 ini. Jadi kalau misalnya pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi VII ini sepakat, saya mengusulkan untuk redaksinya Komisi VII DPRRI meminta Dirjen IKFT Kemenperin, Dirjen Minerba KESDM, untuk bisa berkoordinasi dengan sektor kementerian terkait guna menerapkan tata niaga industri semen secara transparan untuk meningkatkan utilisasi industri semen dan menjaga stabilitas harga semen di tanah air.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Dengan kementerian terkait ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Betul, Pimpinan.

Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen IKFT, mungkin ini juga Pak Nasril juga tadi menyampaikan kalau ini pasti akan melibatkan Kementerian Perdagangan mungkin. BKPM ikut lagi juga Pak, oke begitu

Pimpinan. Tapi kita tidak menyampaikan di sini, karena kita tidak dalam posisi berbicara dengan kementerian-kementerian tersebut. Jadi kita meminta.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Kementerian terkait jadinya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Betul.

Kedua Dirjen ini untuk melakukan koordinasi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya saya pikir betul. Jadi ke dua dirjen ini berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menerapkan, karena kalau BKPM kan lembaga ya, eh kementerian ya, kementerian, lembaganya nggak, ini lembaganya salah kalau gitu. Kementerian terkait guna menerapkan tata niaga industri semen secara transparan untuk meningkatkan utilisasi industri semen dan menjaga stabilitas harga semen di tanah air. Gitu ya kira-kira ya, setuju ya. Ya terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

Pak Ridwan ada lagi? nggak?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Izin sedikit aja, Pak Pimpinan.

Sebetulnya yang penting itu bukan hanya transparan tetapi efisien juga tata niaganya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Secara transparan dan efisien. Ya. Oke ya. Ini saya cabut saya ketok lagi nih. Transparan dan efisien untuk meningkatkan utilisasi industri semen dan menjaga stabilitas harga semen di tanah air. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Karena tadi sekali, ini dua kali lebih afdol.

3. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk melakukan moratorium pemberian izin pembangunan pabrik semen baru sampai dengan tahun 2028.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Nah jadi, kebetulan kan industrinya kita pembina industrinya, tapi perizinannya kebetulan ada di Kementerian Investasi atau BKPM.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Betul, tapi kan BKPM itu kan dia sebelum mengeluarkan izinnya berkoordinasi dulu dengan, dengan, dengan Dirjen IKFT kan. Jadi, jadi, jadi *step* awalnya mereka harus dengan IKFT dulu, ya kan betul nggak. Jadi tidak meng, tidak meng apa ya, tidak mengotorisasi atau tidak memberikan rekomendasi untuk menjadi izin kan Pak. Rekomendasi izinnya kan dari Kementerian Perindustrian kan ya betul ya. Nggak apa-apa ini arahnya ke situ sebetulnya. Ya jadi,

3. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk melakukan moratorium pemberian izin pembangunan pabrik semen baru atau pemberian rekomendasi ya, rekomendasi dan izin atau bagaimana.

DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (MUHAMMAD KHAYAM):

Rekomendasi sebenarnya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Rekomendasi ya. Pemberian rekomendasi untuk izin nah, untuk izin pembangunan pabrik semen baru sampai dengan tahun 2028. *Oke*, setuju. Ini takut gw tarik lagi entar.

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia untuk menyusun strategi dalam mengatasi permasalahan *oversupply* semen, serta memastikan agar distribusi semen dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan.

Asosiasinya dihapus, Pimpinan. Pokoknya kalau masalah regulasi jangan kasih asosiasi, Mas.

Makasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

4. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk menyusun strategi dalam mengatasi permasalahan *oversupply* semen, serta memastikan harga distribusi semen dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Oke setuju?

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan paling lambat tanggal 2 Februari.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan sebelum ke poin 5, Pimpinan.

Apabila diizinkan dan disepakati untuk poin meminta kepada Ketua Asosiasi Semen Indonesia dalam memberikan koordinasi yang baik kepada anggota untuk memperlancar proses komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah masing-masing, itu bisa dimasukkan dalam poin kesimpulan karena tadi beliau juga tadi sudah siap gitu secara lisan kan, akan lebih mantap kalau misalnya itu dimasukkan di poin kesimpulan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ya ini kalau ini pesennya dalem ini, kalau ini nih. Siap siap.

5. Komisi VII DPRRI meminta Ketua Umum Asosiasi Semen.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Untuk mengkoordinir mungkin ya. Mengkoordinir anggota asosiasi, agar bisa.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Agar dapat.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Agar dapat, siap, menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat sesuai wilayah produksi masing-masing. Perlu ditambah dalam rangka menjalin sinergitas yang baik atau bagaimana, Pimpinan?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Saya pikir ini cukup.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Cukup ya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Ini kuat ini.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Pak Widodo, *oke* Pak Widodo?

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Okelah, selama ini kita kan dari CSR Pak selalu koordinasi dengan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Iya makanya, ini kan siap.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Siap. Ini kan yang disinggung kan Jember tadi.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Nggak apa-apa, ini kan juga untuk mengingatkan anggotanya ya, Mas ya, gitu ya Mas ya. Setuju ya. *Oke*.

(RAPAT : SETUJU)

6. Komisi VII DPRRI Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan paling lambat tanggal 2 Februari 2022.

Cukup tanggal 2? Tanggal 2 itu hari Rabu, Pak. Minggu depan. Aman ya, aman ya *oke* siap.

(RAPAT : SETUJU)

Sudah ya. Ada cuman 6 kesimpulan ya.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Demikian pembahasan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI pada hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, kami persilakan Bapak Dirjen IKFT, Pak Dirjen Minerba atau dari Ketua Asosiasi Semen Indonesia atau yang mewakili untuk memberikan sambutan penutup, kami persilakan.

**DIREKTUR JENDERAL IKFT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
(MUHAMMAD KHAYAM):**

Baik.

Pak Pimpinan,
Para Anggota Komisi VII DPR, kemudian
Bapak Ridwan Djamiluddin Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM,
Pak Widodo dan sebagai Ketua Asosiasi Semen Indonesia, dan
Bapak/Ibu sekalian.

Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita *sharing* informasi dan juga mencari solusi. Jadi, itu apa itu pemerintah itu juga sudah coba untuk menangani hal-hal tersebut, cuman mungkin apa menjadi lebih efektif lagi ketika DPR juga ikut apa namanya sebagai pengawas ini saya pikir baik ya, karena kita tahu bahwa semen sebagai barang penting yang sangat diperlukan untuk proyek infrastruktur.

Mungkin itu dari kami, semoga apa dengan pembahasan ini industri semen ya jadi bisa tumbuh menjadi industri yang lebih kompetitif.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Pak Dirjen.

Jadi, kita pasti Pak, kita pasti akan dukung dan kami akan pantau terus sampai sejauh mana hasil dari pembicaraan kita hari ini, Pak gitu aja. Yang lain mungkin ada yang disampaikan, Pak Ridwan?

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih.

Pak Pimpinan beserta Anggota Komisi VI yang terhormat,
Pak Dirjen IKFT,
Ketua Asosiasi Semen.

Yang pertama, kami menegaskan sekali lagi bahwa penggunaan batu bara untuk industri dalam negeri adalah prioritas utama, sehingga kami akan terus mengawal itu.

Yang kedua, untuk meningkatkan daya saing industri semen, kami akan berkoordinasi erat juga untuk memastikan agar pasokan bahan baku juga dapat kompetitif dan meningkatkan nilai manfaat yang lebih, khususnya bagi daerah-daerah di mana lokasi pabrik semen terdapat.

Demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Selamat sore.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih, Pak Ridwan.

Pak Widodo ada tutupan dari Pak Widodo, terima kasih.

KETUA ASOSIASI SEMEN INDONESIA (IR. WIDODO SANTOSO, M.B.A.):

Baik.

Jadi, kami mewakili 14 anggota mengucapkan seribu banyak terima kasih kepada Anggota Komisi VII, Bapak Pimpinan yang telah memperhatikan kesulitan kami selama 3 tahun ini kita *oversupply* yang luar biasa. Semoga dengan pertemuan ini dan mungkin kami mohon mungkin bisa setiap enam bulan dipanggil kami siap Pak mengenai, karena kondisi kami sangat parah. Jadi, bayangkan kalau 116 dalam negeri cuma 70, kelebihan 46 juta jadi kalau nggak dibantu oleh DPR, tentunya kami juga agak susah ya.

Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, semoga Bapak/Ibu sekalian diberi kesehatan, bebas Covid dan sejahtera bersama keluarga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDIP/WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Waaalaikumsalam,

Terima kasih.

Terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen IKFT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia atas kerja sama yang baik dalam rapat ini.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPRRI menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. rapat dengar pendapat pada hari ini saya nyatakan ditutup.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL....WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002